

Edisi: Juli 2026



Manfaatkan AI untuk Dongkrak Ekspor UMKM

**Jerman Antusias Ingin Tingkatkan
Investasi dan Pertukaran Pekerja
dengan Indonesia**

**Indonesia dan India Memiliki Nilai
Bersama untuk Masa Depan**

**Indonesia Punya Modal Besar Jadi
Pemain Kunci Era Software-Defined
Vehicles**

**BI All Out Jaga Stabilitas dan Dorong
Laju Pertumbuhan Ekonomi**

AI

DONGKRAK EKSPOR UMKM DENGAN MEMANFAATKAN AI

Anindya Novyan Bakrie



"Ekspor Indonesia tidak cukup hanya tumbuh. Ekspor Indonesia harus berubah. Dan perubahan itu dimulai ketika jutaan UMKM menjadikan Artificial Intelligence (AI) sebagai mitra bisnis untuk menembus pasar global."

JAKARTA— Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi salah satu kekuatan perdagangan terbesar di dunia. Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, populasi usia produktif yang dominan, serta jaringan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan berbagai negara. Namun, satu pertanyaan penting masih harus kita jawab: mengapa kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih relatif kecil dibandingkan potensinya?

Selama ini, hambatan terbesar UMKM bukanlah kualitas produk.

Banyak produk Indonesia mampu bersaing di pasar global. Yang sering menjadi persoalan adalah informasi. Banyak pelaku usaha tidak mengetahui negara mana yang membutuhkan produknya, bagaimana memanfaatkan fasilitas tarif preferensial dalam FTA dan CEPA, bagaimana memenuhi ketentuan *rules of origin*, hingga prosedur ekspor yang harus dilalui.

Di era kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), hambatan informasi seperti itu seharusnya tidak lagi menjadi penghalang. Karena itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama *Singapore Business Federation* (SBF) mengambil langkah strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada *Singapore-Indonesia Leaders' Retreat* di Istana Merdeka, Jakarta, 6 Juli 2026. Kerja sama ini bukan sekadar membangun platform digital, melainkan menghadirkan AI sebagai penasihat perdagangan (*trade advisor*) bagi pelaku UMKM Indonesia.

Dalam kuartal pertama 2026 saja, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura telah mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Namun, saya meyakini bahwa capaian tersebut baru merupakan permulaan. Potensi kerja sama yang dapat dikembangkan masih jauh lebih besar dibandingkan yang telah dicapai saat ini.

Melalui platform *Trade AI Advisor* (TAIA) yang dikembangkan SBF, pelaku usaha dapat memperoleh panduan perdagangan internasional kapan saja. AI akan membantu mengidentifikasi negara tujuan ekspor yang paling potensial, menjelaskan ketentuan tarif, persyaratan ekspor, aturan asal barang, hingga strategi memasuki pasar internasional. Teknologi yang sebelumnya hanya dinikmati perusahaan besar kini harus menjadi milik jutaan UMKM Indonesia. Inilah demokratisasi teknologi. AI bukan lagi hanya alat untuk meningkatkan efisiensi perusahaan besar, tetapi menjadi instrumen pemerataan kesempatan ekonomi.

Saat ini nilai ekspor Indonesia telah mencapai sekitar 300 miliar dolar AS per tahun. Sebagian besar memang masih berasal dari komoditas seperti batu bara, minyak sawit, mineral, dan berbagai produk berbasis sumber daya alam. Komoditas tersebut tetap menjadi kekuatan Indonesia. Namun, masa depan ekspor nasional tidak boleh hanya bergantung pada komoditas primer.

Kita memerlukan lebih banyak ekspor produk manufaktur, produk kreatif, makanan olahan, furnitur, fesyen, kerajinan, komponen industri, serta berbagai produk UMKM yang memiliki nilai tambah tinggi. Di sinilah AI dapat menjadi akselerator.

Banyak orang belum menyadari bahwa Indonesia sesungguhnya sudah menjadi bagian dari rantai pasok global. Berbagai komponen yang diproduksi di Indonesia digunakan dalam produk-produk perusahaan dunia, mulai dari industri penerbangan, otomotif listrik, hingga produk kesehatan dan konsumsi. Tantangan berikutnya adalah memperbanyak pelaku UMKM yang mampu masuk ke rantai pasok tersebut.

Karena itu, Kadin terus mengembangkan kampanye **"We Buy From Indonesia"**. Kampanye ini bukan sekadar ajakan membeli produk Indonesia, tetapi upaya membangun kepercayaan dunia bahwa Indonesia mampu menjadi mitra produksi global yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan.

Kerja sama dengan *Singapore Business Federation* juga mencerminkan pentingnya kolaborasi regional. Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan logistik dunia. Indonesia memiliki pasar, sumber daya, serta kapasitas produksi yang besar. Bila kedua kekuatan ini dipadukan melalui teknologi digital dan AI, kita dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang jauh lebih efisien bagi pelaku usaha di kedua negara.

Kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwa transformasi digital bukan hanya berbicara mengenai *cloud computing*, pusat data, atau aplikasi digital. Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Optimisme tersebut diperkuat oleh pandangan dunia usaha internasional. *Chairman Singapore Business Federation* Mark Lee menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat kuat. Populasi lebih dari 280 juta jiwa, urbanisasi yang terus berlangsung, pertumbuhan kelas menengah, pembangunan berbagai pusat ekonomi baru, serta sumber daya alam yang melimpah menjadi modal besar bagi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

Pandangan serupa juga tercermin dalam survei internasionalisasi SBF yang menunjukkan Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan utama ekspansi perusahaan Singapura di kawasan ASEAN. Artinya, dunia internasional masih melihat Indonesia sebagai mitra ekonomi yang sangat menjanjikan.

Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Persaingan global berlangsung semakin cepat. AI sedang mengubah cara dunia memproduksi barang, mengelola rantai pasok, memasarkan produk, hingga mengambil keputusan bisnis. Negara yang paling cepat mengadopsi teknologi akan memperoleh keuntungan kompetitif yang jauh lebih besar. Karena itu, Kadin memandang AI bukan ancaman terhadap lapangan kerja, melainkan alat untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mempercepat lahirnya eksportir-eksportir baru dari kalangan UMKM.

Indonesia telah memiliki berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara. Tantangan kita bukan lagi membuat lebih banyak perjanjian, melainkan memastikan seluruh fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh jutaan pelaku usaha nasional. Di situlah AI memainkan peran strategis. AI mampu mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi keputusan, dan keputusan menjadi peluang bisnis.

Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih banyak perusahaan yang menembus pasar global. Kita membutuhkan lebih banyak UMKM yang naik kelas menjadi eksportir. Kita membutuhkan lebih banyak produk Indonesia yang menjadi bagian dari rantai pasok dunia.

Kadin Indonesia berkomitmen menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju tujuan tersebut. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan transformasi digital bukanlah seberapa canggih teknologinya, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ketika AI mampu membantu satu UMKM menembus pasar dunia, sesungguhnya yang sedang kita ekspor bukan hanya sebuah produk. Kita sedang mengeksplor kreativitas, daya saing, dan masa depan Indonesia.

Saya meyakini, era baru perdagangan dunia bukan lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya terbesar, melainkan oleh siapa yang paling cepat memanfaatkan teknologi. AI bukan sekadar inovasi digital, melainkan mesin penggerak ekspor Indonesia.

Jika setiap UMKM mampu memanfaatkan AI untuk memasuki pasar global, maka Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai bangsa yang unggul dalam inovasi, produktivitas, dan kewirausahaan. Itulah jalan menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR ISI

Manfaatkan AI untuk Dongkrak Ekspor UMKM, Kadin Gandeng <i>Singapore Business Federation</i>	6
Hubungan Indonesia dan India: Dari Warisan Peradaban Menuju Kedaulatan Digital Lewat ION	9
Anindya Bakrie Ungkap Jerman Antusias Ingin Tingkatkan Investasi dan Pertukaran Pekerja dengan Indonesia	14
Perry Warjiyo: BI <i>All Out</i> Jaga Stabilitas dan Dorong Laju Pertumbuhan Ekonomi	16
Anindya Bakrie di <i>Summer Davos 2026</i> : Indonesia Punya Modal Besar Jadi Pemain Kunci Era <i>Software-Defined Vehicles</i>	18
Kunjungi Tiongkok, Kadin Indonesia Dorong Peningkatan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi	20
Ketum Kadin Sampaikan Aspirasi Dunia Usaha dalam RDPU RUU Kadin Bersama Baleg DPR RI	22
Bahas Revisi UU Kadin dengan Badan Legislasi DPR RI, Bamsoet Tegaskan Revisi UU Kadin Jadi Momentum Perkuat Kemitraan Negara dan Dunia Usaha	24
Kadin Jateng Lepas Peserta Program <i>Ausbildung</i> Angkatan V, Siap Tempuh Pendidikan Vokasi di Jerman	26
Kadin Dorong Kesehatan sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sosialisasi <i>White Paper</i> “Health is the New Wealth”	27
Industri Keramik Dalam Negeri Butuh Keberpihakan Pemerintah	30
<i>Womenpreneur Goes to Campus</i> , Kadin Dorong Mahasiswa Terjun ke Dunia Usaha	31
Kadin Indonesia Dorong Kolaborasi Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana Melalui <i>Virtual Business Disaster Operation Center</i>	32

DAFTAR ISI

Kadin Dorong Penguatan Hilirisasi Rantai Pasok Tanaman Herbal di Indonesia

34

Kadin Berikan Penghargaan bagi Perusahaan dengan Praktik ESG Terbaik

35

Indonesia-Belarus Business Forum Hasilkan 11 Kerja Sama Strategis, Kadin Dorong Investasi Jangka Panjang

39

Ketum Kadin dan Menlu Sepakat Pentingnya Diplomasi Ekonomi Jadi Prioritas Utama Perkuat Perdagangan dan Investasi

42

Anindya Bakrie Ungkap Hong Kong Berperan Strategis Perkuat Perdagangan dan Investasi Indonesia

44

Gelar Prasasta Gala *Awards* 2026, Kadin Jateng Pacu Daya Saing Daerah

45

Kadin NTT Dukung *Friendship City* Kupang-Darwin, Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata

46

Kadin Papua Tengah Bentuk Koperasi Honai, Siap Jadi Penggerak UMKM di 8 Kabupaten

48

Kadin Kalsel Berharap Perbaikan Iklim Usaha Usai Berakhirnya Fasilitas PPh Final UMKM

49

Andi Iwan Darmawan Kembali Pimpin Kadin Sulsel Periode 2026-2031

51

Pengurus Kadin Kepri 2026-2031 Dikukuhkan, Anindya Bakrie Minta Agar *Free Trade Zone* Dioptimalisasi Demi Menarik Minat Investor

52

Manfaatkan AI untuk Dongkrak Ekspor UMKM, Kadin Gandeng Singapore Business Federation



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan *Chairman Singapore Business Federation* (SBF) Mark Lee menandatangani MoU kerja sama pemanfaatan AI untuk UMKM, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/07/2026).

JAKARTA— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat kerja sama strategis dengan Singapore Business Federation (SBF) untuk mempercepat ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah ini diharapkan membantu pelaku UMKM menembus lebih banyak pasar internasional dengan memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Chairman Singapore Business Federation (SBF) Mark Lee, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/07/2026). Penandatanganan MoU menjadi salah satu hasil penting dalam Singapore-Indonesia Leaders' Retreat 2026, yang memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kerja sama tersebut bukan sekadar membangun platform digital, melainkan menghadirkan teknologi AI sebagai "penasihat perdagangan" (trade advisor) yang mampu membantu pelaku UMKM mengidentifikasi peluang ekspor secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

"Tadi yang ditandatangani antara Kadin dan Singapore Business Federation adalah kerja sama untuk membuat trade dengan dukungan AI. Tujuannya membantu UMKM supaya bisa mengekspor lebih banyak lagi dengan memanfaatkan fasilitas AI, sehingga mereka mengetahui bagaimana menggunakan berbagai free trade agreement maupun comprehensive economic partnership agreement yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara," ujar Anindya kepada wartawan usai penandatanganan.

Menurut Anin, sapaan Anindya, nilai ekspor Indonesia saat ini telah mencapai sekitar US\$300 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar memang masih didominasi komoditas besar seperti batu bara, minyak sawit, dan produk berbasis sumber daya alam. Namun di luar sektor-sektor tersebut, kontribusi UMKM terhadap ekspor terus meningkat dan memiliki ruang pertumbuhan yang jauh lebih besar.

Karena itu, lanjut Anin, teknologi AI akan dimanfaatkan untuk memetakan pasar potensial, memberikan rekomendasi negara tujuan ekspor, menjelaskan ketentuan tarif, aturan asal barang (rules of origin), hingga prosedur ekspor yang harus dipenuhi pelaku usaha.



Presiden RI, Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/07/2026).

"Di situlah kita membutuhkan teknologi Artificial Intelligence untuk melihat potensi pasar mana yang harus ditembus. Dengan memanfaatkan free trade agreement maupun comprehensive economic partnership agreement yang ada, UMKM kita bisa naik kelas dan memperluas pasar ekspornya," katanya.

Anindya menambahkan, kerja sama tersebut juga mendukung kampanye We Buy From Indonesia, yang bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menurutnya, selama ini banyak komponen industri Indonesia yang sebenarnya telah menjadi bagian dari produk-produk perusahaan kelas dunia.

"Banyak komponen dari produk-produk terkenal seperti Boeing, Tesla, maupun Dettol yang diproduksi di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kerja sama ini menggunakan teknologi untuk akselerasi ekspor di sektor-sektor tertentu. Di situlah pentingnya kolaborasi Indonesia dan Singapura," ujarnya.

Melalui MoU tersebut, Kadin Indonesia dan SBF sepakat bekerja sama dalam tiga bidang utama, yakni digitalisasi perdagangan, dialog kebijakan, dan penguatan kapasitas UMKM. Kedua organisasi bisnis juga akan menyelenggarakan diskusi meja bundar (roundtable discussions), lokakarya, pelatihan, pendampingan, serta forum berbagi pengetahuan yang melibatkan pelaku usaha, pakar perdagangan, dan pembuat kebijakan.

Salah satu program unggulan dalam kerja sama tersebut adalah pengembangan Trade AI Advisor (TAIA), platform berbasis Generative Artificial Intelligence yang di

kembangkan SBF melalui Centre for the Future of Trade and Investment (CFOTI). Platform ini dirancang sebagai konsultan digital yang dapat diakses kapan saja (on demand) untuk memberikan panduan perdagangan lintas batas secara praktis.

Melalui TAIA, pelaku UMKM akan memperoleh informasi mengenai persyaratan ekspor, strategi memasuki pasar internasional, ketentuan tarif, aturan asal barang, hingga peluang memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dimiliki Indonesia maupun Singapura. Platform tersebut juga akan dikembangkan dalam versi Bahasa Indonesia sehingga lebih mudah digunakan oleh pelaku usaha nasional.

Selain menjadi sarana konsultasi digital, TAIA diharapkan melengkapi berbagai program pelatihan dan dialog kebijakan yang dijalankan Kadin dan SBF. Pendekatan berbasis AI memungkinkan layanan diberikan secara mandiri (self-service), dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha (scalable), sekaligus membantu UMKM mengambil keputusan ekspor secara lebih cepat dan berbasis data.

Kerja sama ini sekaligus mencerminkan arah baru hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura yang semakin menitikberatkan pada transformasi digital, pengembangan kecerdasan buatan, serta peningkatan daya saing pelaku usaha. Di tengah perlambatan perdagangan global, kedua negara memilih memperkuat kolaborasi teknologi agar UMKM mampu menjadi motor pertumbuhan ekspor dan memperluas integrasi ekonomi ASEAN.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie bersama jajaran para menteri koordinator/menteri RI saat kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/07/2026).

Fundamental Indonesia Tetap Kuat

Pada kesempatan yang sama, Ketua Singapore Business Federation (SBF) Mark Lee menegaskan gejolak rupiah, pasar saham, maupun meningkatnya kehati-hatian investor tidak mengubah prospek jangka panjang Indonesia sebagai tujuan investasi. Menurutnya, volatilitas merupakan fenomena global yang terjadi dalam sekitar 18 bulan terakhir dan justru membuka peluang baru bagi dunia usaha.

“Volatilitas bukan hanya terjadi di Indonesia. Dalam setiap volatilitas selalu ada peluang,” kata Lee kepada The Business Times di sela Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat di Jakarta, Senin (6/7/2026). Ia menilai fundamental Indonesia tetap sangat kuat, ditopang oleh populasi lebih dari 280 juta jiwa, urbanisasi yang pesat, pertumbuhan kelas menengah, serta program pembangunan berbagai pusat ekonomi baru. Faktor-faktor tersebut akan terus mendorong permintaan terhadap perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai produk konsumsi.

Ia juga menilai Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berupa ketersediaan lahan, sumber daya alam, energi, kawasan industri, dan potensi energi surya yang sulit ditandingi negara lain di kawasan. Bahkan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan daya saing perusahaan berorientasi ekspor karena biaya produksi dalam rupiah menjadi lebih rendah, sementara penerimaan ekspor umumnya menggunakan dolar Amerika Serikat. “Saya selalu mengatakan, jika memiliki pandangan jangka panjang, jangan mencoba menebak waktu pasar. Jalani saja siklusnya,” ujar Lee.

Senada, Chief Executive Officer SBF Kok Ping Soon mengatakan minat perusahaan Singapura berekspansi ke Indonesia tetap tinggi. Berdasarkan survei internasionalisasi SBF pada April 2026, sebanyak 65% perusahaan Singapura yang berencana berekspansi memilih ASEAN, dengan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bersama Malaysia dan Thailand.

Kok menambahkan Indonesia tetap menarik berkat potensi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur digital yang semakin baik, serta biaya operasional yang kompetitif. Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat beragam sehingga perusahaan perlu memahami karakteristik setiap daerah dan memiliki mitra lokal yang tepat.

Optimisme tersebut menjadi dasar penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara SBF dan Kadin Indonesia pada 6 Juli 2026. Melalui kerja sama itu, kedua organisasi akan mengembangkan digitalisasi perdagangan, dialog kebijakan, penguatan kapasitas UMKM, serta platform Trade AI Advisor (TAIA) berbasis kecerdasan buatan generatif untuk membantu pelaku usaha memahami aturan perdagangan internasional, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas, dan memperluas akses ke pasar global.

Hubungan Indonesia dan India: Dari Warisan Peradaban Menuju Kedaulatan Digital Lewat ION

"Hubungan Indonesia dan India telah melampaui ujian waktu. Jika pada masa lalu kedua bangsa dipersatukan oleh jalur rempah, agama, dan peradaban, maka pada abad ke-21 keduanya dipertemukan oleh sesuatu yang sama strategisnya: teknologi, data, dan ekonomi digital. Dari Borobudur hingga Indonesia Open Network (ION), kemitraan Indonesia-India terus berevolusi—dari membangun peradaban menuju membangun kedaulatan digital."

Oleh: Primus Dorimulu



Presiden RI Prabowo Subianto dan PM India Narendra Modi saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

HUBUNGAN Indonesia dan India adalah hubungan peradaban. Hubungan kedua negara besar itu tidak sekadar hubungan diplomatik. Jauh sebelum lahirnya negara modern, Nusantara dan anak benua India telah terhubung oleh jalur perdagangan, agama, bahasa, seni, arsitektur, dan filsafat. Dari India datang pengaruh Hindu dan Buddha yang kemudian berakar kuat di Nusantara, melahirkan mahakarya seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, wayang, kisah Ramayana dan Mahabharata, serta berbagai nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas Indonesia.

Kini, setelah ribuan tahun, hubungan itu memasuki babak baru. Jika masa lalu Indonesia-India ditandai oleh pertukaran rempah, agama, dan kebudayaan, maka masa depan kedua negara akan ditentukan oleh teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, keamanan siber, pertahanan, dan kedaulatan data. Inilah transformasi besar hubungan Indonesia-India: dari warisan peradaban menuju kemitraan masa depan.

Momentum itu semakin kuat setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India, menghadiri Republic Day, 26 Januari 2025. Sebagai balasan, Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia, 7 Juli 2026. Pertemuan kedua pemimpin menjadi simbol bahwa Indonesia dan India tidak lagi hanya berbicara tentang perdagangan, tetapi juga tentang rebalancing hubungan ekonomi yang selama ini timpang, kerja sama industri pertahanan, teknologi digital, konektivitas maritim, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Indonesia dan India juga telah memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan, investasi, industri strategis, maritim, dan konektivitas digital menjelang kunjungan PM Modi ke Indonesia.

Dalam perdagangan, Indonesia selama ini menikmati surplus cukup besar terhadap India. Ekspor Indonesia masih didominasi batu bara, minyak sawit, karet, mineral, dan komoditas berbasis sumber daya alam. Sementara itu, India semakin kuat dalam farmasi, manufaktur, teknologi informasi, mesin, otomotif, dan jasa digital. Surplus perdagangan tentu menguntungkan Indonesia, tetapi struktur seperti ini belum cukup untuk membawa Indonesia naik kelas. Yang dibutuhkan bukan sekadar surplus, melainkan nilai tambah. Karena itu, rebalancing perdagangan harus diarahkan pada investasi, transfer teknologi, pengembangan industri bersama, dan penguatan ekosistem digital nasional.

Di sinilah Indonesia Open Network atau ION menjadi sangat strategis. ION bukan marketplace. ION adalah Digital Public Infrastructure, yakni infrastruktur digital publik terbuka yang dirancang untuk menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, lembaga keuangan, layanan mobilitas, dan layanan pemerintah dalam satu ekosistem yang interoperabel. ION terinspirasi oleh keberhasilan Open Network for Digital Commerce di India, sebuah inisiatif yang mendorong jaringan perdagangan digital terbuka agar pembeli, penjual, platform, dan peritel tidak bergantung pada satu platform tertutup.

Dengan ION, Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi digital generasi berikutnya. Ekonomi digital tidak boleh hanya dikuasai segelintir platform besar yang selama ini mengembangkan closed network.

UMKM, koperasi, petani, pedagang pasar, pengemudi, mahasiswa, dan masyarakat desa harus ikut menjadi pelaku utama. Lebih dari 30 juta UMKM yang terdaftar dapat memperoleh etalase digital, akses pembeli nasional, logistik terintegrasi, pembiayaan, asuransi, insentif pemerintah, dan business matching berbasis AI. Inilah demokratisasi perdagangan digital dan itu hanya mungkin lewat open network yang akan dikembangkan oleh Indonesia Open Network.

ION juga penting karena menyentuh jantung persoalan masa depan: kedaulatan digital. Di abad ke-21, kedaulatan negara tidak lagi hanya ditentukan oleh wilayah, tentara, dan sumber daya alam. Kedaulatan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai data, algoritma, infrastruktur digital, sistem pembayaran, jaringan logistik, dan kecerdasan buatan. Negara yang tidak memiliki infrastruktur digital sendiri akan menjadi pasar bagi platform asing. Negara yang tidak menguasai data akan kehilangan kendali atas arah ekonominya sendiri.

Karena itu, ION harus dipahami sebagai bagian dari digital sovereignty Indonesia. Data UMKM, data transaksi, data logistik, data pembiayaan, data mobilitas, dan data pasar harus menjadi aset strategis nasional. Data tidak boleh hanya menjadi bahan bakar bagi korporasi digital besar. Data harus kembali memberi manfaat kepada pelaku ekonomi rakyat. Jika dirancang dengan tata kelola yang benar, ION dapat menjadi jalan tengah antara inovasi pasar dan perlindungan kepentingan nasional.

Lebih jauh lagi, ION membuka jalan menuju AI sovereignty. Kecerdasan buatan hanya akan kuat jika didukung data yang luas, terstruktur, dan relevan dengan realitas lokal. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna AI buatan negara lain. Indonesia harus membangun kemampuan AI sendiri, berbasis bahasa Indonesia, perilaku konsumen Indonesia, karakter UMKM Indonesia, pola pertanian Indonesia, dan kebutuhan desa Indonesia. Dengan arsitektur Beckn 2.0 yang AI-first dan siap memasuki era agentic commerce, ION dapat menjadi fondasi bagi lahirnya AI Indonesia yang bekerja untuk kepentingan bangsa sendiri.

Dimensi ketiga adalah strategic autonomy. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Dalam ekonomi digital, prinsip itu harus diterjemahkan menjadi kemampuan memilih, membangun, dan mengendalikan teknologi sendiri tanpa terjebak ketergantungan pada satu blok kekuatan global. Kerja sama dengan India menjadi penting karena India bukan hanya mitra dagang, tetapi negara demokrasi besar yang telah berhasil membangun Digital Public Infrastructure dalam skala raksasa. India membuktikan bahwa teknologi digital tidak harus selalu dikendalikan oleh platform tertutup. Teknologi dapat dibangun sebagai infrastruktur publik yang terbuka, inklusif, dan kompetitif.



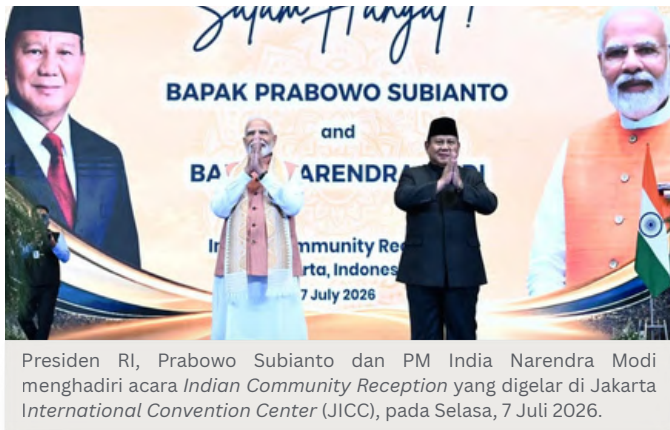
Suasana Indian Community Reception yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Selasa, 7 Juli 2026.

Kunjungan PM Modi ke Indonesia pada 7 Juli 2026 memiliki makna yang jauh melampaui seremoni diplomatik. Peluncuran ION dapat menjadi simbol lahirnya babak baru hubungan Indonesia-India: dari diplomasi budaya menuju diplomasi teknologi; dari perdagangan komoditas menuju ekonomi pengetahuan; dari surplus dagang menuju surplus nilai tambah; dari ketergantungan digital menuju kedaulatan digital.

Jika pada masa lalu India ikut memberi inspirasi bagi lahirnya Borobudur, Prambanan, dan wayang, maka pada abad digital, India dapat menjadi mitra strategis Indonesia dalam membangun fondasi teknologi masa depan. Namun, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penerima teknologi. Indonesia harus menjadi pemilik, pengembang, dan pengendali arah transformasinya sendiri.

Keberhasilan India membangun Open Network for Digital Commerce (ONDC) telah menjadi salah satu contoh paling menonjol bagaimana open network mampu mentransformasi ekonomi digital secara inklusif. Melalui standar terbuka dan interoperabilitas, jutaan UMKM India memperoleh akses yang lebih luas ke pasar digital tanpa bergantung pada satu platform dominan. Ekosistem yang semakin terbuka itu juga mempercepat inklusi keuangan, memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal, dan menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya basis investor ritel yang kini menjadi kekuatan baru pasar modal India.

Terinspirasi pengalaman ONDC, Indonesia dengan bantuan para ahli dari India-mengembangkan Indonesia Open Network (ION) dengan mengadopsi prinsip-prinsip open network yang telah terbukti berhasil di India, namun disesuaikan dengan kebutuhan, regulasi, dan karakteristik ekonomi nasional. Dengan demikian, ION bukan sekadar adaptasi teknologi, melainkan hasil pengembangan Indonesia yang telah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum.



Presiden RI, Prabowo Subianto dan PM India Narendra Modi menghadiri acara *Indian Community Reception* yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Selasa, 7 Juli 2026.

ION menjadi simbol babak baru kemitraan strategis Indonesia-India: India berbagi pengalaman dan inovasi digital, sementara Indonesia mengembangkannya menjadi fondasi ekonomi digital nasional yang terbuka, inklusif, dan berdaulat bagi UMKM, koperasi, pelaku usaha, serta masyarakat luas.

Proses pengembangan ION mendapat dukungan penuh Pemerintah India sebagai wujud nyata kemitraan strategis kedua negara di bidang ekonomi digital dan Digital Public Infrastructure (DPI). Meski terinspirasi dari ONDC, ION merupakan hasil pengembangan Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan, regulasi, dan karakteristik ekonomi nasional. Karena itu, ION telah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual Indonesia di Kementerian Hukum, sekaligus menjadi aset strategis bangsa dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang terbuka, inklusif, dan interoperabel.

Peluncuran resmi ION dijadwalkan menjadi acara puncak seremoni kenegaraan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi di Istana Negara pada 7 Juli 2026. Momentum ini bukan sekadar peluncuran sebuah infrastruktur digital, melainkan penanda lahirnya babak baru hubungan Indonesia-India: dari kemitraan yang dibangun atas sejarah, perdagangan, dan investasi, menuju kolaborasi strategis dalam membangun fondasi ekonomi digital masa depan. Sebagaimana hubungan kedua negara pernah mencatat sejarah pada awal kemerdekaan, ION diharapkan menjadi tonggak baru yang menghubungkan Indonesia dan India dalam membangun kedaulatan digital, memperkuat daya saing UMKM, serta memperluas inklusi ekonomi bagi jutaan masyarakat.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan jalan tol, pelabuhan, bendungan, kawasan industri, dan infrastruktur energi. Tetapi Indonesia Emas 2045 juga membutuhkan jalan tol digital: jaringan terbuka yang menghubungkan UMKM, petani, koperasi, pasar tradisional, desa, startup, universitas, bank, fintech, logistik, dan pemerintah dalam satu ekosistem nasional yang efisien, inklusif, dan berdaulat.

ION bukan sekadar proyek teknologi. ION adalah proyek kedaulatan. Jika dibangun dengan visi besar, tata kelola kuat, dan ekosistem yang terbuka, ION dapat menjadi salah satu fondasi terpenting bagi ekonomi digital Indonesia generasi berikutnya. Dari Borobudur dan Prambanan, Indonesia mewarisi kebesaran peradaban. Dari ION, Indonesia berpeluang membangun kebesaran masa depan.

Kemajuan hubungan Indonesia-India dalam beberapa tahun terakhir juga tidak dapat dilepaskan dari peran Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty. Sejak mulai bertugas pada Agustus 2023, diplomat senior India tersebut aktif memperkuat diplomasi antarmasyarakat (*people-to-people diplomacy*) sekaligus memperluas kerja sama strategis kedua negara. Salah satu inisiatifnya adalah membangun jembatan komunikasi melalui pertukaran kunjungan para pemimpin media arus utama. Pada Januari 2024, sebanyak 15 pemimpin media Indonesia diundang menghadiri perayaan Hari Republik India di New Delhi. Program tersebut kemudian diikuti dengan kunjungan balasan para pemimpin media India ke Indonesia pada 2025, yang semakin memperkuat saling pengertian dan jejaring antarlembaga media kedua negara.

Dalam pengembangan ION, Sandeep Chakravorty juga memainkan peran penting sebagai penghubung dan pendorong kerja sama antara Indonesia dan India. Ia tidak hanya menjalankan fungsi diplomasi dari balik layar, tetapi juga aktif memfasilitasi dialog, mempertemukan para pemangku kepentingan, serta mendorong alih pengetahuan dan pengalaman dari keberhasilan ONDC di India kepada Indonesia. Kontribusinya menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat lahirnya ION sebagai fondasi baru ekonomi digital Indonesia.

Atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral, masa tugas Duta Besar Sandeep Chakravorty diperpanjang selama dua tahun. Pada masa penugasannya pula, pembangunan kembali kompleks Kedutaan Besar India di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berhasil diselesaikan. Gedung kedutaan yang baru bukan hanya menjadi simbol kehadiran diplomatik India di Indonesia, tetapi juga mencerminkan semakin eratnya kemitraan strategis kedua negara yang kini berkembang dari kerja sama politik dan ekonomi menuju kolaborasi dalam inovasi, teknologi, dan transformasi digital.

Sejarah telah membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan India selalu melahirkan warisan yang melampaui zamannya. Dahulu hubungan itu memperkaya peradaban Nusantara melalui ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Kini, hubungan yang sama berpeluang melahirkan fondasi baru bagi ekonomi digital Indonesia. Apabila Borobudur dan Prambanan menjadi monumen kebesaran peradaban masa lalu, maka ION diharapkan menjadi monumen kedaulatan digital Indonesia pada abad ke-21—simbol bahwa persahabatan antarbangsa tidak hanya mewariskan sejarah, tetapi juga membangun masa depan.

KADIN MENGHADIRI KUNJUNGAN KENEGARAAN PERDANA MENTERI NARENDRA MODI KE INDONESIA



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berjabat tangan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang didampingi Presiden RI Prabowo Subianto saat penyambutan kunjungannya ke Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri kedatangan Perdana Menteri India, Narendra Modi dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026).



Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya bersama Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).



Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya (kiri), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Azis Syamsuddin (tiga dari kanan), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri James T. Riady (dua dari kanan) saat menghadiri kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).



Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Prabowo Subianto, di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Anindya Bakrie Ungkap Jerman Antusias Ingin Tingkatkan Investasi dan Pertukaran Pekerja dengan Indonesia



Presiden RI, Prabowo Subianto memperkenalkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie kepada Presiden Republik Federal Jerman H.E. Frank-Walter Steinmeier dalam kunjungannya ke Indonesia, di Istana Merdeka, pada Senin (15/06/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan optimisme terhadap penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan Jerman usai menghadiri Indonesia-Germany Economic Dialogue with Minister of State for the German Federal Foreign Office and Germany Business Dialogue dalam rangka kunjungan Presiden Republik Federal Jerman H.E. Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Senin (15/06/2026).

Anindya atau Anin sapaan akrabnya mengatakan kalangan bisnis Jerman menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk memperluas kerja sama ekonomi dengan Indonesia, terutama dalam memanfaatkan peluang yang akan terbuka melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

“Terlihat banyak sekali animo keinginan untuk, satu, berdagang, memanfaatkan daripada IEU-CEPA, sangat antusias dan tentunya kita juga sangat antusias,” kata Anin.

Selain perdagangan, lanjut Anin, kerja sama yang dibahas juga mencakup sektor industrialisasi, mulai dari pengembangan mineral kritis, transisi energi, hingga teknologi manufaktur yang lebih maju.

“Dan yang kedua untuk industrialisasi tadi disampaikan dari mineral kritis, energi transisi, sampai kepada advancement factoring,” ujarnya.

Anin menambahkan, pihak Jerman juga berkeinginan meningkatkan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Di sisi lain, terdapat peluang kerja sama yang lebih luas dalam bidang ketenagakerjaan melalui program pertukaran pekerja antara kedua negara.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar usai *Indonesia-Germany Economic Dialogue* di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Senin (15/06/2026).

"Kami berterima kasih Pak Menko (Airlangga Hartarto) memperjuangkan juga bagaimana tenaga kerja kita bisa lebih banyak ke sana. Bahkan dari pihak mereka, dari Jerman juga ingin ada pertukaran pekerja supaya bisa terjadi bukan hanya relasi yang baik antara people to people tapi juga saling belajar supaya ilmunya semakin tinggi di era industrialisasi dan juga upaya-upaya pemerintah ini," tutur Anin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman H.E. Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka.

Menurut Menko Airlangga, delegasi bisnis Jerman secara khusus ingin mengetahui berbagai peluang kerja sama ekonomi yang dapat dikembangkan setelah implementasi IEU-CEPA.

"Jerman membawa bisnis delegation dan bisnis delegation-nya tadi mengadakan pertemuan, terutama mereka menanyakan tentu pasca IEU-CEPA ini nanti apa yang menjadi peluang untuk Indonesia," kata Airlangga.

Ia menambahkan bahwa Jerman juga memberikan apresiasi terhadap kesiapan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah menurunnya jumlah generasi muda di negara tersebut, Jerman melihat peluang untuk memperkuat kerja sama ketenagakerjaan dan pengembangan kompetensi.

"Dan Jerman kan salah satu negara yang jumlah generasi mudanya berkurang. Jadi mereka ingin memanfaatkan itu dan tadi saya tawarkan dalam joint commissioning industri dan ekonomi," ujarnya.

Airlangga mengatakan kedua negara berencana membahas lebih lanjut kerja sama penempatan tenaga kerja dan program pelatihan dalam forum Joint Commission on Industry and Economy yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

"Di bulan September mendatang kita bisa mempersiapkan rencana dua pihak untuk penempatan tenaga kerja ataupun pelatihan baik itu orang Indonesia maupun Jerman. Dan tadi saya minta langsung pada Ketua Umum Kadin untuk mengorganisasi hal tersebut," katanya.

Selain isu ketenagakerjaan, delegasi Jerman juga menunjukkan ketertarikan terhadap peluang investasi di sektor mineral strategis Indonesia, termasuk unsur tanah jarang (rare earth) dan nikel.

"Yang ketiga tentu kaitannya dengan beberapa investment mereka. Mereka menanyakan sektor apa lagi yang bisa mendorong kerja sama Indonesia dan Jerman. Terutama mereka tertarik terkait dengan rare earth juga termasuk mengenai nickel," ujar Airlangga.

Meski demikian, Airlangga mengingatkan bahwa kerja sama industri yang dibangun harus mempertimbangkan kondisi pasar global, termasuk adanya kelebihan kapasitas produksi baja di Eropa.

"Tapi juga saya sampaikan bahwa Eropa saat sekarang merasa punya excess kapasitas daripada baja. Di mana mereka mau memotong produksi baja di Eropa juga dipotong dari 80 juta ton AS ke 40 juta ton. Nah itu juga yang saya sampaikan. Sektor-sektor yang kita lakukan harapannya kita tidak menambah excessnya. Tapi sektor lain yang kita masih sangat terbuka," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar, WKU Bidang Perlindungan Pekerja Migran Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi dan Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan Minister of State, Federal Foreign Office Jerman, Florian Hahn saat acara pembukaan *Indonesia-Germany Economic Dialogue* di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Senin (15/06/2026).



Sesi foto bersama *Indonesia-Germany Economic Dialogue* yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Senin (15/06/2026).

Perry Warjiyo: BI *All Out* Jaga Stabilitas dan Dorong Laju Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Primus Dorimulu



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (dua dari kanan) memberikan cinderamata kepada Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo (dua dari kiri) usai *Focus Group Discussion* di Gedung BI, Jakarta, Kamis (18/06/2026).

BANK INDONESIA (BI) menegaskan komitmennya untuk bekerja total menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, BI memastikan seluruh instrumen kebijakan akan diarahkan untuk menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat sistem keuangan, serta mendukung ekspansi dunia usaha.

"Kami ingin setelah pertemuan ini selesai, kita semua keluar dari ruangan ini dengan optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh, rupiah menguat, inflasi terkendali, dan kredit terus meningkat," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat berdiskusi dengan pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Gedung BI, Jakarta, Kamis (18/06/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri Deputy Senior Gubernur BI Destry Damayanti, para Deputy Gubernur BI, serta jajaran pimpinan Kadin Indonesia, Perry menegaskan bahwa BI akan mengerahkan seluruh kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung agenda pertumbuhan dan berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

"Pesan kami sederhana. Pertama, optimistis. Kedua, BI *all out* menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," ujar Perry.

Menurut dia, BI selama ini selalu mengedepankan pendekatan pro-bisnis, tidak hanya kepada industri keuangan dan perbankan, tetapi juga kepada sektor riil. Dengan dukungan 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, BI siap memperkuat sinergi dengan Kadin hingga ke daerah untuk menggerakkan investasi, ekspor, industri pengolahan, dan UMKM.

Perry mengatakan BI mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi industri, penguatan investasi, pengembangan UMKM, dan ekonomi kerakyatan. Namun di saat yang sama, BI harus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga agar berbagai capaian pembangunan tidak terganggu oleh gejolak global.

"Kami mendukung penuh garis kebijakan Bapak Presiden. Saat terjadi tekanan eksternal dan gejolak pasar keuangan, tugas BI adalah memastikan stabilitas tetap terjaga agar kemajuan ekonomi yang telah dicapai tidak tergerus," tegasnya.

Ketidakpastian Global

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menjelaskan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi ketidakpastian tinggi meskipun Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara pada 14 Juni 2026.

Gangguan logistik global, ketegangan geopolitik, serta masih tingginya harga sejumlah komoditas strategis diperkirakan menekan pertumbuhan ekonomi dunia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi sekitar 3,0% pada 2026 dari 3,4% pada tahun sebelumnya, sementara inflasi global diproyeksikan meningkat menjadi 4,4%.

Kondisi tersebut mendorong bank sentral negara maju mempertahankan kebijakan moneter ketat. Sikap hawkish bank sentral utama dunia, khususnya Federal Reserve, menyebabkan penguatan dolar AS dan mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. "Tekanan eksternal tersebut menjadi tantangan bagi seluruh emerging markets, termasuk Indonesia," ujar Firman.

Meski demikian, Firman menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Konsumsi rumah tangga masih terjaga, stimulus fiskal pemerintah berjalan, tingkat keyakinan dunia usaha tetap berada pada zona ekspansi, dan investasi terus meningkat. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada pada kisaran 4,9%-5,7%.

Modal Asing Mulai Masuk

Untuk meredam tekanan eksternal, BI telah memperkuat bauran kebijakan moneter sejak Mei 2026. Setelah menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin pada Mei dan 25 basis poin secara tidak terjadwal pada 9 Juni, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur Juni menjadi 5,75%.

Selain itu, BI memperkuat intervensi di pasar valas, menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memperluas operasi moneter, serta memberikan berbagai insentif guna menarik aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

"Kebijakan yang kami tempuh mulai menunjukkan hasil positif. Aliran modal asing ke SRBI dan Surat Berharga Negara mulai meningkat, rupiah menguat, dan cadangan devisa tetap kuat," kata Firman. Inflasi juga masih terkendali. Pada Mei 2026 inflasi tercatat 3,08% secara tahunan, masih berada dalam kisaran sasaran BI sebesar 2,5% plus minus 1%.



Kredit Tumbuh Dua Digit

Di sisi pertumbuhan ekonomi, BI tetap menjalankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Pertumbuhan kredit perbankan hingga Mei 2026 tercatat sekitar 11,5% secara tahunan, didorong oleh pembiayaan investasi dan program-program produktif pemerintah.

Untuk mempercepat intermediasi perbankan, BI terus memperbesar insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar Rp418 triliun. Insentif tersebut diberikan kepada bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas seperti hilirisasi, UMKM, ketahanan pangan, perumahan, dan ekonomi hijau.

BI juga meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan serta memperbesar batas Rasio Pendanaan Luar Negeri guna memperluas sumber pembiayaan bagi sektor produktif.

Tetap Optimistis

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut baik langkah-langkah BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut dia, komunikasi yang erat antara regulator dan dunia usaha menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi global. "Kami optimistis bisa melewati situasi ini. Tanda-tanda perbaikan sudah mulai terlihat. Kenaikan suku bunga yang dilakukan BI memang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kami mengapresiasi langkah tersebut," kata Anin, sapaan Anindy Novyan Bakrie.

Ia menegaskan Kadin siap bersinergi dengan BI hingga tingkat daerah. Sebagai organisasi yang menaungi seluruh dunia usaha Indonesia melalui jaringan Kadin di 514 kabupaten/kota serta berbagai asosiasi bisnis, Kadin siap mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan investasi, ekspor, hilirisasi, dan penguatan UMKM. Menurut Anindya, dunia usaha saat ini terus berupaya meningkatkan ekspor guna memperbesar surplus perdagangan dan menambah pasokan devisa. Di sisi lain, Kadin juga mendorong masuknya investasi asing langsung (FDI) untuk memperkuat kapasitas industri nasional.

"Kami melihat optimisme tetap ada. Tantangan memang besar, tetapi peluang juga terbuka lebar. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BI, perbankan, dan dunia usaha, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sesi foto bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersama Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan di Gedung BI, Jakarta, Kamis (18/06/2026).

Anindya Bakrie di *Summer Davos* 2026: Indonesia Punya Modal Besar Jadi Pemain Kunci Era *Software-Defined Vehicles*

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam sesi bertajuk “When Cars Became Software” pada rangkaian *17th Annual Meeting of the New Champions 2026 ‘Summer Davos’* yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) di Dalian, Tiongkok, Selasa (23/06/2026).



Dalian, Tiongkok – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri kendaraan berbasis perangkat lunak atau *software-defined vehicles* (SDV) berkat kekayaan mineral kritis, potensi energi terbarukan, dan bonus demografi yang dimiliki.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat menjadi pembicara dalam sesi bertajuk “When Cars Became Software” pada rangkaian *17th Annual Meeting of the New Champions 2026 ‘Summer Davos’* yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) di Dalian, Tiongkok, Selasa (23/06/2026).

Anin menjelaskan bahwa transformasi industri otomotif menuju kendaraan berbasis perangkat lunak tidak hanya berbicara mengenai data dan teknologi digital, tetapi juga mencakup kebutuhan terhadap material maju, energi, serta kemampuan manufaktur berteknologi tinggi.

“Ketika kita berbicara mengenai mobil yang menjadi perangkat lunak, kita juga berbicara mengenai sebuah platform, bukan hanya untuk perangkat lunak dan data, tetapi juga untuk ilmu material, mineral kritis, energi, dan tentu saja manufaktur maju,” ujarnya.

Anin menyebut, Indonesia memiliki hampir seluruh mineral kritis yang dibutuhkan dalam pengembangan kendaraan listrik maupun SDV. Indonesia saat ini merupakan produsen nikel terbesar di dunia serta termasuk lima besar dunia untuk komoditas tembaga, seng, bauksit, dan timah.

“Kemampuan Indonesia untuk mengolah mineral-mineral kritis tersebut akan sangat membantu perkembangan *software-defined vehicles*,” kata Anin.

Selain kekayaan sumber daya alam, Anin menilai potensi energi terbarukan menjadi keunggulan lain yang dimiliki Indonesia. Saat ini kapasitas energi terpasang nasional mencapai sekitar 100 gigawatt yang masih didominasi energi konvensional. Namun ke depan, sekitar 75 persen tambahan kapasitas pembangkit baru ditargetkan berasal dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan hidro.

Menurut Anin, transisi energi tersebut menjadi peluang besar untuk mendorong transformasi industri nasional menuju industri yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Di sisi lain lanjut Anin, Indonesia juga memiliki modal besar berupa sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 285 juta jiwa dan pertumbuhan sekitar lima juta kelahiran setiap tahun, industrialisasi menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kita harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Karena itu industrialisasi menjadi sangat penting,” ujar Anin.

Meski demikian, Anin melihat peluang terbesar penerapan SDV di Indonesia bukan hanya pada kendaraan penumpang, sistem hiburan kendaraan, atau teknologi bantuan mengemudi canggih. Menurut Anin, potensi terbesar justru berada pada sektor manajemen armada dan logistik.

Diungkapkan Anin, Indonesia memiliki sekitar 6,5 juta truk, kendaraan pertambangan, dan kendaraan logistik, serta sekitar 300 ribu bus yang membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih efisien.

"Ini perlu dikelola dengan baik agar Indonesia bisa naik ke level berikutnya sekaligus mendorong industrialisasi yang lebih kuat," kata Anin.

Lebih lanjut, Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia, kata Anin, masih menghadapi tantangan biaya logistik yang relatif tinggi. Karena itu, pemanfaatan teknologi SDV dan kecerdasan buatan diyakini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

Anin menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan cerdas tidak berarti perangkat keras atau hardware menjadi tidak relevan. Sebaliknya, kebutuhan terhadap material maju justru semakin meningkat.

"Ketergantungan terhadap material bukan berkurang, tetapi semakin intensif. Material baterai harus lebih efisien, lebih padat energi, dan tetap stabil secara termal. Untuk itu dibutuhkan nikel, lebih banyak tembaga untuk menghantarkan listrik, serta aluminium ringan yang berasal dari bauksit," jelas Anin.

Menurut Anin, terdapat empat faktor utama yang akan mendorong Indonesia bergerak menuju rantai nilai yang lebih tinggi, yakni besarnya permintaan domestik, kebutuhan industrialisasi, optimalisasi nilai tambah sumber daya alam, serta tekanan perubahan iklim dan urbanisasi.

Lebih jauh, Anin juga menyoroti tingginya antusiasme generasi muda terhadap transformasi energi. Saat ini sekitar 60 persen penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun.

Sebagai contoh, Anin menyebut program elektrifikasi transportasi publik di Jakarta yang tengah berjalan. Dalam lima tahun ke depan, armada Bus Rapid Transit (BRT) Jakarta yang mencapai sekitar 10 ribu unit ditargetkan beralih menjadi kendaraan listrik.

"Ini menjadi gerakan publik yang mendorong elektrifikasi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia," ujar Anin.

Dalam kesempatan tersebut, Anin juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan SDV di Indonesia. Menurutnya, penguasaan teknologi tidak dapat terjadi dalam waktu singkat sehingga kemitraan dengan investor dan perusahaan global menjadi faktor penting.

"Pengolahan material baterai dan produksi baterai membutuhkan mitra. Mitra membawa investasi asing langsung, menciptakan lapangan kerja, dan membantu memperkuat stabilitas ekonomi," kata Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menjadi salah satu pembicara pada rangkaian 17th Annual Meeting of the New Champions 2026 'Summer Davos' yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) di Dalian, Tiongkok, Selasa (23/06/2026).

Lebih lanjut, Anin berharap perkembangan SDV dan kendaraan berbasis kecerdasan buatan dapat membantu Indonesia menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini biaya logistik Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Anin, angka tersebut perlu ditekan hingga mendekati 5 persen agar daya saing ekonomi nasional semakin meningkat.

"Ketika berbicara mengenai shared mobility, itu memang penting. Tetapi bagi Indonesia, yang lebih penting adalah bagaimana teknologi dapat menurunkan biaya logistik untuk menggerakkan perekonomian. Itulah yang saya harapkan bisa terwujud dalam tiga tahun ke depan," pungkas Anin.

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi panel tersebut yaitu *Senior Fellow Salata Institute for Climate and Sustainability Harvard University* Elaine Buckberg, *Chief Executive Officer* Motovis Zhenghua (Jack) Yu dan *Chief Manufacturing Officer, Contemporary Ampere Technology (CATL)* Ni Jun.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie juga menjalani serangkaian agenda strategis lainnya di Tiongkok.

Kegiatan tersebut antara lain melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok H.E. Djauhari Oratmangun, memberikan wawancara khusus kepada *China Global Television Network (CGTN)*, menghadiri *APEC China CEO Forum* bersama para anggota *APEC Business Advisory Council (ABAC)*, serta mengikuti *Welcoming & Networking Banquet* dalam rangka penyelenggaraan *China International Supply Chain Expo*.

Kunjungi Tiongkok, Kadin Indonesia Dorong Peningkatan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

Beijing, Tiongkok – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan yang telah terbangun dengan pemerintah maupun pengusaha Tiongkok.

“Tiongkok mitra dagang terbesar Indonesia. Jadi, kita harus hadir di sini. Angka perdagangan Indonesia dan Tiongkok tahun lalu adalah sekitar 168 miliar dolar AS dan saya kira angka itu akan terus tumbuh, dan tidak lama lagi kita akan menjadi mitra dagang nomor dua atau bahkan jadi mitra dagang nomor satu bagi Tiongkok,” kata Anindya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Tiongkok, Minggu (21/6/2026).

Anin, sapaan akrab Anindya, datang ke Tiongkok untuk menghadiri sejumlah acara yaitu *China International Supply Chain Expo* dan *APEC CEO Forum* di Beijing, *Summer Davos 2026* di Dalian maupun pertemuan dengan mitra lainnya.

“Indonesia mengeksport sekitar seperempat dari total ekspornya ke Tiongkok dan mengimpor sekitar sepertiga barang impornya dari Tiongkok. Tugas saya di sini bersama beberapa anggota Kadin adalah menyampaikan bahwa kita tidak hanya ingin meningkatkan perdagangan, tetapi juga ingin menciptakan nilai bersama,” ungkap Anin.

Anin menyebut ingin mengajak mitra dari Tiongkok untuk berinovasi bersama.

“Saya kira semua itu dimulai dari percakapan, sehingga kita dapat membangun lebih banyak kepercayaan, terutama di tengah ketegangan geopolitik. Harapannya, akan ada lebih banyak kolaborasi,” tambah Anin.

Bidang-bidang yang akan menjadi fokus pembicaraan Kadin, menurut Anin adalah pertama di bidang kendaraan listrik.

“Namun, kami tidak hanya ingin fokus pada perdagangan kendaraan listrik, tetapi juga masuk ke seluruh rantai pasoknya. Bukan hanya untuk melayani pasar Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga dunia,” ungkap Anin.

Menurut dia, aktivitas Kadin ini akan dapat membantu hilirisasi mineral Indonesia termasuk dalam pabrik pembuatan baterai kendaraan listrik.

“Pada akhirnya, kami ingin memiliki kendaraan listrik dan merek kendaraan listrik sendiri bersama Tiongkok, dengan dukungan teknologi, modal, dan pengalaman. Itulah salah satu bidang yang ingin kami fokuskan” tambah Anin.



Jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) berfoto bersama jajaran Kedutaan Besar RI di Beijing, Tiongkok, Minggu (21/6/2026).

Bidang kedua, lanjutnya, adalah energi terbarukan dengan sasaran membangun industrialisasi di dalam negeri melalui kerja sama dengan mitra-mitra di Tiongkok.

“Bidang ketiga adalah pusat data, infrastruktur digital, dan kecerdasan buatan. Menurut saya, Tiongkok merupakan salah satu dari dua kekuatan besar terdepan dalam kecerdasan buatan, kecerdasan buatan akan menjadi infrastruktur super bagi berbagai sektor,” jelas Anin.

Dalam bidang kecerdasan buatan, Anin mengatakan Indonesia harus melakukan penguatan dari hulu bersama-sama agar tetap berada di posisi teratas.

“Bukan hanya membangun pusat data, tetapi juga membangun daya komputasi, karena Indonesia memiliki banyak sekali penggunaan internet,” tambah Anin.

Bidang keempat adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menurut Anin memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 60 juta orang penduduk Indonesia sekaligus menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Karena itu, kita harus memperjuangkan mereka. Kita perlu melibatkan dan mengintegrasikan mereka untuk memastikan ekonomi terus tumbuh, dari 5,1 persen menjadi 5,6 persen, hingga mencapai 8 persen sebagaimana ambisi yang didorong oleh Presiden,” tambah Anin.

Dalam pertemuan tersebut Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun memaparkan bahwa pada 2025, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Tiongkok mencapai 167,48 miliar dolar AS dengan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 16,7 persen.

Sedangkan dengan Hong Kong, nilai perdagangan Indonesia adalah sekitar 6 miliar dolar AS sehingga bila digabung antara Tiongkok dan Hong Kong totalnya menjadi 173 miliar dolar AS.

“Bila hubungan Indonesia dan Tiongkok tetap baik dan kita menjaga momentum ekonomi, maka dalam enam tahun, jumlah tersebut akan berganda,” kata Dubes Djauhari.

Namun jumlah itu masih di bawah Malaysia yang mencapai 191,66 miliar dolar AS dan Vietnam di posisi pertama sebagai mitra dagang Tiongkok di ASEAN dengan nilai 296,14 miliar dolar AS.

Sementara investasi Tiongkok di Indonesia mencapai sekitar 7,58 miliar dolar AS pada periode yang sama sedangkan investasi dari Hong Kong mencapai 10,1 miliar dolar AS sehingga bila digabungkan total Investasi dari Tiongkok dan Hong Kong di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 18 miliar dolar AS, menjadikannya sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia.

Sedangkan dalam hubungan antar-masyarakat, Dubes Djauhari mengatakan jumlah mahasiswa Indonesia di Tiongkok mencapai sekitar 20 ribu orang, masih di bawah jumlah sebelum COVID-19 yang mencapai 60 ribu orang tapi sudah jauh meningkat dibanding saat pandemi yang menurun drastis yaitu 2 ribu orang.

“Jadi jika investasi meningkat, bisa menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi mahasiswa yang lulus dari sini,” tambah Dubes Djauhari.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan buku berjudul “We Buy from Indonesia” kepada Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, di Beijing, Tiongkok, Minggu (21/6/2026).

Ketum Kadin Sampaikan Aspirasi Dunia Usaha dalam RDPU RUU Kadin Bersama Baleg DPR RI

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi, serta perwakilan asosiasi dan himpunan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).

Anindya atau Anin sapaan akrabnya mengatakan, Undang-Undang Kadin No 1 Tahun 1987 yang berlaku saat ini telah menjadi landasan bagi organisasi. Namun, berbagai perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir membuat dunia usaha menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks.

“Dengan keadaan ekonomi yang penuh dengan tantangan dan peluang juga, gara-gara tentunya geopolitik, perang, perubahan daripada digitalisasi dan juga tentunya sudah lewat dari zaman reformasi ke tahun 1987 kan sebelumnya,” kata Anin.

Dikatakan Anin, kehadiran Kadin dalam RDPU tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di kalangan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan dunia usaha agar terus tumbuh, berkembang, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Karena kita lihat esensinya ialah bagaimana dunia usaha bisa terus menggeliat dan juga bergotong royong dan juga naik kelas,” ujar Anin.

Anin menjelaskan, Kadin memiliki peran sebagai rumah besar dunia usaha yang menaungi berbagai asosiasi, himpunan, serta Kadin Provinsi. Karena itu, Kadin berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sehingga intinya bagaimana kita bersama-sama bisa membantu pemerintah sebagai mitra strategis. Tapi yang paling penting bagaimana supaya perekonomian Indonesia itu bisa maju,” tutur Anin.

Lebih lanjut, Anin menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu fokus utama pembangunan ekonomi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sekitar 4 hingga 5 juta lapangan kerja baru setiap tahun untuk mengakomodasi angkatan kerja yang terus bertambah.

“Kawula muda kita yang baru lulus, kita harus terus meningkatkan perdagangan dan juga tentunya industrialisasi. Dan itu dibutuhkan suatu investasi. Tapi ujungnya bagaimana lapangan kerja dan juga pengusaha bisa terus berkembang,” kata Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan buku “We Buy From Indonesia” kepada Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan paparannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).



Jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).

Anin juga menegaskan bahwa seluruh pembahasan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan Indonesia dan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi nasional saat ini sudah berada di jalur yang tepat, meskipun masih memerlukan percepatan dan modernisasi.

“Ya intinya ini buat Indonesia. Bagaimana supaya yang kita canangkan dunia usaha bisa maju, tumbuh terus. Sampai kepada Indonesia Emas (2045). Di tengah banyaknya tentunya tantangan-tantangan. Dan juga banyak sekali orang-orang yang istilahnya mengatakan Indonesia itu arahnya kemana. Tapi kami melihat arahnya sudah benar. Tinggal mesti diakselerasi dan dimodernisasi,” pungkas Anin.



Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).

Hadir jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Erwin Aksa, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Luar Negeri James T. Riady, WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Carmelita Hartoto, WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar, WKUK Bidang Sosial Nita Yudi, WKUK Bidang Politik dan Keamanan Bambang Soesatyo dan WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin.

Hadir pula jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi di antaranya Ketum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Selatan Affandi Udji, Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Ritchie Glen Yapranadi, Ketum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi, Ketum Kadin Provinsi Jawa Barat Almer Faiq Rusydi, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku Muhammad Armyrn Syarif Latuconsina, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Barat Zaneth Raodathul dan Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing.

Bahas Revisi UU Kadin dengan Badan Legislasi DPR RI, Bamsuet Tegaskan Revisi UU Kadin Jadi Momentum Perkuat Kemitraan Negara dan Dunia Usaha



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berdiskusi dengan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).

Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsuet), menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan ekonomi nasional yang semakin kompleks.

Posisi Kadin sebagai representasi dunia usaha perlu diperkuat melalui landasan hukum yang lebih kokoh agar mampu berperan optimal sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing Indonesia di tingkat dunia.

Selama lebih dari empat dekade Kadin telah menjadi jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha. Namun perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, transformasi industri, serta semakin ketatnya persaingan global menuntut penguatan kelembagaan Kadin melalui revisi regulasi yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Revisi UU Kadin ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari startup digital hingga pedagang kecil, agar mereka dapat tersambung langsung dengan jalur kebijakan nasional.

"Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibanding saat Undang-Undang Kadin disusun puluhan tahun lalu.

Dunia usaha membutuhkan kepastian, koordinasi yang kuat, serta mekanisme kemitraan yang jelas antara negara dan sektor swasta. Revisi UU Kadin menjadi syarat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut," ujar Bamsuet dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan Kadin Indonesia di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (17/6/26).

Hadir Pimpinan Badan Legislasi DPR Ketua Bob Hasan, Wakil Ketua Martin Manurung, Iman Sukri dan Sturman Panjaitan. Dari Kadin Indonesia hadir antara lain Ketum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Wakil Ketua Umum Koordinator James Riady, Azis Syamsuddin, Mulyadi Jayabaya, Bobby Gofur Umar, Erwin Aksa, Nita Yudi, Carmelita Hartoto, Firman Soebagyo, serta Taufan Rotorasiko.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, revisi UU Kadin harus mampu menjadikan Kadin sebagai institusi modern yang mampu mengonsolidasikan seluruh kekuatan dunia usaha Indonesia. Salah satu substansi penting yang diusulkan adalah penguatan status Kadin yang setara dengan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (sui generis) dan berstatus non-budgeter. Penguatan status hukum tersebut penting karena Kadin menjalankan fungsi yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan maupun asosiasi profesi. Kadin memiliki mandat publik yang berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam revisi undang-undang tersebut juga diusulkan penguatan kedudukan Kadin sebagai satu-satunya representasi dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Bamsoet menilai kepastian mengenai representasi tunggal dunia usaha akan menghindari tumpang tindih kewenangan, konflik kepengurusan, serta memperkuat efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Pemerintah memerlukan satu mitra resmi yang memiliki legitimasi kuat untuk menyampaikan aspirasi dunia usaha. Di sisi lain, pelaku usaha juga membutuhkan kepastian kelembagaan agar suara mereka dapat tersampaikan secara efektif dalam proses pengambilan kebijakan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini memaparkan, revisi UU Kadin juga mengatur fungsi publik Kadin sebagai lembaga yang menjalankan fungsi quasi-negara atau institutional mirror. Dalam konsep tersebut, Kadin memperoleh ruang untuk berperan dalam tiga klaster utama, yakni perumusan kebijakan ekonomi, pembinaan pelaku usaha, serta pendampingan dunia usaha. Praktik seperti ini lazim diterapkan di berbagai negara maju.

Penguatan peran Kadin juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam perumusan berbagai kebijakan strategis. Pemerintah diharapkan mengikutsertakan Kadin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga pembahasan rancangan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berdampak terhadap dunia usaha.

Ketua Umum ARDIN Indonesia dan Wakil Ketua Pemuda Pancasila ini menuturkan, dalam RUU



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo beserta pengurus Kadin Indonesia dan para Ketua Umum Kadin Provinsi di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).

Kadin diusulkan pemberian kewenangan kepada Kadin dalam penerbitan berbagai dokumen rekomendasi perdagangan internasional, registrasi lembaga sertifikasi, penguatan sistem pelatihan, hingga penegakan kode etik dunia usaha melalui mekanisme sanksi bertingkat. Standar bisnis yang kuat menjadi syarat penting bagi peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

Revisi UU Kadin juga mengatur sistem keanggotaan yang lebih terintegrasi dengan ekosistem perizinan usaha nasional. Keanggotaan Kadin diusulkan menjadi salah satu syarat administratif dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha yang mencakup perusahaan nasional, BUMN, BUMD, koperasi, hingga perusahaan penanaman modal asing.

“Aspek lain yang dianggap sangat penting adalah penguatan struktur organisasi Kadin dari tingkat nasional hingga daerah serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui Komite Etik yang bersifat final dan mengikat. Pengaturan tersebut diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta menghindari konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu iklim usaha,” pungkas Bamsoet.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo memberikan pandangannya di sesi diskusi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/06/2026).

KABAR QUICK WIN KADIN

Kadin Jateng Lepas Peserta Program *Ausbildung* Angkatan V, Siap Tempuh Pendidikan Vokasi di Jerman



Jajaran Pengurus Kadin Provinsi Jateng berfoto dengan para peserta Program Persiapan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Sistem Ganda (*Duale Ausbildung*) ke Jerman Angkatan V Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa (26/05/2026).

Semarang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melalui Edu Kadin resmi menutup Program Persiapan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Sistem Ganda (*Duale Ausbildung*) ke Jerman Angkatan V Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa (26/05/2026).

Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian pembekalan peserta sebelum melanjutkan program vokasi dan karir di Jerman.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jateng Harry Nuryanto Soediro menekankan pentingnya menjaga disiplin, etos kerja, dan nama baik Indonesia selama menjalani pendidikan dan pelatihan di Jerman.

“Program Ausbildung bukan hanya tentang belajar dan bekerja di luar negeri, tetapi juga tentang membangun karakter, profesionalisme, dan membawa nama baik bangsa di tingkat internasional,” ujar Harry.

Harry juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di kancah global.

Program Ausbildung yang diselenggarakan oleh Edu Kadin Provinsi Jateng merupakan salah satu upaya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis industri internasional. Program ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sekaligus memperkuat kompetensi generasi muda Indonesia di dunia kerja global.

KABAR PROGRAM



Kadin Dorong Kesehatan sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sosialisasi *White Paper* “Health is the New Wealth”

(Dari kiri) CEO Halodoc Jonathan Sudharta, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ichsan Zulkarnaen, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Lucia Rizka Andalusia, Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute Mulya Amri saat sosialisasi *White Paper* bertajuk “Health is the New Wealth” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute (KII) menggelar sosialisasi *White Paper* bertajuk “Health is the New Wealth” yang menegaskan kesehatan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung dalam forum KII 8% Club di Menara Kadin Indonesia Jakarta Selatan, Rabu (08/07/2026).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani, mengatakan tema *Health is the New Wealth* bukan sekadar slogan, melainkan mencerminkan perubahan paradigma global bahwa kesehatan telah menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi.

“Negara-negara yang memiliki sistem kesehatan yang kuat terbukti memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, ketahanan ekonomi yang lebih baik, serta daya saing yang lebih kuat dalam menarik investasi,” ujar Shinta.

Menurut Shinta, Indonesia saat ini berada pada momentum yang tepat untuk memperkuat sektor kesehatan seiring bonus demografi yang akan berlangsung sekitar satu dekade ke depan, pertumbuhan kelas menengah, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, serta komitmen pemerintah dalam mentransformasi sistem kesehatan nasional.

Shinta menilai sektor kesehatan kini menjadi salah satu sektor paling prospektif untuk investasi jangka panjang. Investasi tersebut tidak hanya terbatas pada pembangunan rumah sakit atau produksi obat-obatan, tetapi mencakup pembangunan ekosistem kesehatan nasional yang terintegrasi.

Ekosistem tersebut kata Shinta meliputi industri farmasi dan bahan baku obat, alat kesehatan, bioteknologi, vaksin, layanan kesehatan digital, kecerdasan buatan untuk layanan medis, riset dan pengembangan, pendidikan tenaga kesehatan, hingga industri pendukung seperti logistik, rantai dingin, dan manufaktur berteknologi tinggi.

“Setiap investasi di sektor ini akan menghasilkan multiplier effect yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing industri nasional. Karena itu kita perlu melihat kesehatan bukan hanya sebagai pengeluaran negara, tetapi sebagai investasi produktif yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi,” kata Shinta.



Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama saat menyampaikan sambutannya dalam sosialisasi *White Paper* bertajuk "Health is the New Wealth" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu, (8/7/2026).

Diakui Shinta, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku farmasi dan alat kesehatan, perlunya peningkatan riset dan inovasi, percepatan alih teknologi, hingga penguatan rantai pasok domestik. Namun, menurutnya tantangan tersebut justru membuka peluang investasi yang besar melalui kemitraan erat antara pemerintah dan dunia usaha guna membangun industri kesehatan nasional yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Lebih lanjut Shinta menjelaskan, White Paper "Health is the New Wealth" merupakan wujud nyata kolaborasi tersebut. Dokumen ini menawarkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat iklim investasi, menyederhanakan regulasi, mendukung inovasi, memperkuat kemitraan pemerintah dan swasta, meningkatkan kapasitas industri nasional serta menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi kesehatan di kawasan.

"Kami percaya kolaborasi merupakan kunci keberhasilan transformasi kesehatan Indonesia. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, demikian pula dunia usaha. Kita memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang nyata melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," ujarnya.

Shinta menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan apabila Indonesia memiliki masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas.

"Investasi di bidang kesehatan sejatinya adalah investasi pada masa depan bangsa. Ketika masyarakat sehat, produktivitas meningkat. Ketika produktivitas meningkat, daya saing ekonomi tumbuh. Dan ketika ekonomi tumbuh secara inklusif, kesejahteraan masyarakat akan semakin kuat," tutur Shinta.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama mengatakan belanja kesehatan Indonesia saat ini masih sekitar 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau setara sekitar Rp700 triliun.

Menurutnya, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat menuju target 8 persen, maka belanja kesehatan nasional berpotensi meningkat secara signifikan sehingga memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.

"Melalui white paper ini kita memiliki baseline (acuan) yang sangat baik mengenai industri kesehatan Indonesia. Datanya lengkap, komprehensif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Saya berani mengatakan ini adalah salah satu kajian ilmiah terbaik yang pernah diterbitkan di Indonesia untuk industri kesehatan," kata David.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani saat menyampaikan sambutan di acara sosialisasi *White Paper* "Health is the New Wealth" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Lucia Rizka Andalusia menjelaskan bahwa *White Paper* yang mulai disusun sejak tahun 2025 ini bertujuan memotret kondisi riil, dampak ekonomi, serta arah masa depan industri kesehatan di Indonesia.

Menurut Lucia, industri ini didorong oleh beberapa faktor utama, seperti lonjakan populasi lansia yang membutuhkan layanan kesehatan lebih intensif, dan meningkatnya kepedulian publik terhadap kesehatan. Ditandai dengan maraknya penggunaan alat medis mandiri, dan fokus pemerintah dalam memperluas skrining kesehatan sejak bayi baru lahir hingga lansia demi mendeteksi masalah kesehatan secara dini.

"*White Paper* Industri Kesehatan itu kita susun untuk memotret bagaimana kondisi industri kesehatan di Indonesia, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia dan bagaimana ke depannya. Rencana ke depannya seperti apa, termasuk juga di dalamnya ada rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kita perbaiki supaya investasi-investasi di industri kesehatan itu berjalan dengan baik dan bertumbuh," pungkas Lucia.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri.



Industri Keramik Dalam Negeri Butuh Keberpihakan Pemerintah

Oleh: Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia

PEMBANGUNAN yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah seperti sekolah rakyat dan rencana pembangunan 3 juta rumah tentu memberikan angin segar untuk industri keramik dalam negeri. Perlu diketahui Industri keramik dalam negeri secara kualitas, mutu dan desain sudah sangat bersaing dengan keramik impor dari luar negeri, hal itu bisa dilihat dari produk-produk yang ditampilkan dalam pameran keramik Indonesia di Nusantara International Convention Exhibition Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara yang berlangsung dari tanggal 4-7 Juni 2026.

Nah, kemarin saya berkesempatan untuk melihat secara langsung pameran tersebut dan saya sempatkan untuk berbincang secara langsung dengan baik pemilik maupun direksi dari industri keramik dalam negeri dari berbagai merek terkemuka di tanah air termasuk asosiasi yang menaunginya yaitu Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI).

Saya kira industri ini sudah berkembang cukup bagus dan menciptakan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah yang bagus buat bangsa kita, jangan sampai industri ini mati dan tergerus oleh produk impor harga energi yang sudah terlalu tinggi.

Saat ini industri keramik dalam negeri menghadapi suatu masalah serius yaitu harga gas industri yang sudah tidak wajar lagi, padahal industri keramik merupakan salah satu industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yaitu 7 dolar AS per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) tapi saat ini di lapangan industri ini hanya diberikan alokasi 40% dengan harga HGBT, dan sisanya 60% harus beli dengan harga pasar 21 dolar AS per MMBTU.

Tentu ini sangat berat yang akan membuat daya saing industri keramik dalam negeri akan turun dan akhirnya terpaksa harus stop produksi yang kemudian terpaksa kita menjadi negara pengimpor keramik, padahal kita punya sumber bahan baku, nah hal ini jangan sampai terjadi.

Untuk itu keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan agar industri keramik dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

Womenpreneur Goes to Campus, Kadin Dorong Mahasiswa Terjun ke Dunia Usaha



Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara (dua dari kiri) memberikan sambutan kepada para peserta *Womenpreneur Development Forum* bertajuk "Unlocking Digital Opportunity" yang digelar di Universitas Bakrie pada Selasa (23/06/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Universitas Bakrie dan Shopee Indonesia menggelar *Womenpreneur Development Forum* dengan Tema "Unlocking Digital Opportunity" di Universitas Bakrie, Bakrie Tower Epicentrum, Kuningan, Jakarta selatan, pada Selasa (23/06/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan peluang di era ekonomi digital.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara, mengatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari program *Womenpreneur Goes to Campus* yang bertujuan mendorong generasi muda untuk terjun ke dunia kewirausahaan.

"Kadin ingin mendorong lebih banyak lagi *womenpreneur* yang tercipta melalui *Womenpreneur Goes to Campus* kami. Kami masuk ke kampus-kampus untuk mendorong para anak-anak muda supaya mau menjadi entrepreneur," ujar Tatyana.

Tatyana menjelaskan, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu fokus utama Kadin Indonesia. Oleh karena itu, mayoritas peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perempuan.

Menurut Tatyana, peran perempuan dalam ekonomi digital terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari semakin tingginya partisipasi perempuan dalam berbagai program pengembangan teknologi dan digitalisasi.

Melalui program-program tersebut, Kadin berharap semakin banyak perempuan yang mampu mengembangkan kapasitasnya, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai penggerak ekonomi di tengah transformasi digital yang terus berlangsung.

"Kami ingin para perempuan lebih mandiri secara ekonomi sehingga mereka mempunyai kekuatan dan seperti kita ketahui UMKM perempuan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Jadi ini tentu harus terus kita dorong dan terus kita tingkatkan," pungkas Tatyana.

Wakil Rektor Universitas Bakrie M. Tri Andika Kurniawan mengatakan, kewirausahaan menjadi salah satu output utama kampus. Ia juga menilai perempuan memiliki peran besar dalam ekonomi nasional.

"Kami ingin mahasiswa punya bekal nyata untuk membangun usaha. Banyak aktivitas kewirausahaan di Indonesia digerakkan oleh perempuan," katanya.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi Dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina.



Foto bersama para peserta usai acara *Womenpreneur Development Forum* bertajuk "Unlocking Digital Opportunity" yang digelar di Universitas Bakrie pada Selasa (23/06/2026)



Pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dewi Motik memberikan sambutan kepada para peserta *Womenpreneur Development Forum* bertajuk "Unlocking Digital Opportunity" yang digelar di Universitas Bakrie pada Selasa (23/06/2026).

Kadin Indonesia Dorong Kolaborasi Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana Melalui *Virtual Business Disaster Operation Center*

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik saat menyampaikan sambutannya dalam *Roundtable Dialogue* bertema “Praktik Baik Organisasi dalam Penanganan Bencana di Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/06/2026).



Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar *Roundtable Dialogue* bertema “Praktik Baik Organisasi dalam Penanganan Bencana di Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/06/2026). Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan dunia usaha dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik, mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan dunia usaha dalam bidang sosial dan kebencanaan serta mencari model kolaborasi yang lebih efektif.

Menurut Suryani, peserta yang hadir mencerminkan keberagaman pelaku usaha di Indonesia, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hingga pengusaha perempuan.

“Kita tahu persis bahwa dunia usaha ini keterlibatan dalam kebencanaan ini sudah banyak sekali. Mulai dari pra, sebelum terjadi bencana, kemudian ketika terjadi bencana dan sudah bencana. Tapi yang jadi persoalan adalah mereka bergerak masing-masing. Belum terkoordinasikan, belum dikolaborasikan dengan baik,” ujar Suryani.

Suryani menjelaskan bahwa kurangnya koordinasi sering kali menyebabkan bantuan terpusat di satu lokasi tertentu, sementara wilayah lain yang juga membutuhkan bantuan justru kurang mendapat perhatian.

“Kita dapat satu kesimpulan, ini sering kalau bergerak masing-masing, yang sudah dilakukan oleh satu dunia usaha, dilakukan lagi. Tempatnya mungkin tidak merata, di satu tempat misalnya di (Kabupaten) Bener Meriah (Provinsi Aceh), semua lari ke Bener Meriah karena informasi data yang didapatkan hanya di Bener Meriah. Numpuk di situ, di daerah yang lain tidak,” terang Suryani.

Sebagai solusi, Kadin Indonesia menginisiasi pembentukan *Virtual Business Disaster Operation Center* (VBDOC), sebuah platform kolaboratif yang dirancang untuk menghubungkan berbagai pihak dalam penanganan bencana.

Jadi (VBDOC) ini semacam marketplace untuk kebencanaan. Di situ nanti siapa yang melakukan apa, terus kebutuhannya apa, di masing-masing wilayah siapa saja yang bisa membantu, mulai dari LSM-nya, dunia usahanya, pemerintahnya, kemudian kekuatan dari masing-masing institusi itu apa. Dan Alhamdulillah ditanggapi dengan baik, diterima dengan baik inisiatif itu. Tapi ini panjang perjalanannya, banyak hal yang mesti kita lakukan untuk bisa mencapai ke situ,” jelas Suryani.

“Sementara itu, Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Puji Pujiono, menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam isu kebencanaan merupakan kebutuhan strategis, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi keberlangsungan bisnis itu sendiri.

Menurut Puji, setidaknya terdapat tiga kepentingan utama dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Pertama, memastikan keberlangsungan operasional usaha agar tidak terhenti akibat bencana. Kedua, melindungi keselamatan sumber daya manusia, aset, dan operasional perusahaan. Ketiga, membantu masyarakat yang terdampak bencana serta berkontribusi dalam membangun sistem ketahanan yang lebih kuat.

“Dan yang penting lagi, dalam situasi normal, (dunia usaha) ikut membantu membangun sistem resiliensi yang lebih kuat,” kata Puji.

Lebih lanjut, Puji mengungkapkan bahwa dalam diskusi tersebut para pelaku usaha memaparkan berbagai inisiatif yang telah mereka lakukan, potensi sumber daya yang dimiliki, serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depan.

“Dari diskusi tadi yang didapatkan adalah mereka (dunia usaha) mencari cara bersama-sama untuk membuat trobosan-trobosan baru termasuk koordinasi dengan pemerintah, meningkatkan pemanfaatan data, kemudian membentuk suatu operation center bersama-sama untuk dunia usaha. Ini adalah langkah-langkah maju yang sedang dikonseptualisasi bersama oleh Kadin dengan anggotanya dan pelaku dunia usaha besar dan kecil,” pungkash Puji.



Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik memberikan cinderamata kepada Head of Nurani ASTRA (Perwakilan PT Astra Internasional Tbk), Wahyu Laksono usai menjadi salah satu pembicara dalam Roundtable Dialogue bertema “Praktik Baik Organisasi dalam Penanganan Bencana di Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/06/2026).

Kadin Dorong Penguatan Hilirisasi Rantai Pasok Tanaman Herbal di Indonesia

Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati berdiskusi dengan Ketua Komite Tetap Tanaman Herbal Kadin Indonesia Kusuma Ida Anjani yang juga merupakan Direktur Mustika Ratu dalam pertemuan strategis membahas penguatan hilirisasi rantai pasok tanaman herbal di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (18/06/2026).

Jakarta – Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Devi Erna Rachmawati melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Mustika Ratu yang juga sekaligus Ketua Komite Tetap Tanaman Herbal Kadin Indonesia Kusuma Ida Anjani di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (18/06/2026).

Devi mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas pengembangan ekosistem tanaman herbal nasional, peluang hilirisasi industri, tantangan yang dihadapi petani, serta implementasi program penguatan rantai pasok herbal Indonesia.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang didukung oleh ribuan spesies tanaman obat dan tradisi jamu yang telah menjadi warisan budaya bangsa. Permintaan terhadap produk herbal dan berbasis bahan alami terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional," kata Devi.

Data industri kata Devi, menunjukkan bahwa pasar herbal Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 13,7 miliar dolar AS dan berpotensi tumbuh menjadi lebih dari 25 miliar dolar AS pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sekitar 7,1% per tahun.

Menurut Devi, pengembangan tanaman herbal tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan kesehatan nasional, tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi sektor pertanian.

"Indonesia memiliki kekayaan tanaman herbal yang luar biasa. Tantangan kita saat ini bukan lagi pada budidaya semata, tetapi bagaimana membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global," terang Devi.

Devi menambahkan, beberapa peluang pengembangan industri herbal nasional meliputi:

- Peningkatan permintaan global terhadap produk herbal dan natural wellness.
- Pengembangan industri jamu modern, suplemen kesehatan, kosmetik herbal, dan pangan fungsional.
- Penguatan ekspor produk herbal Indonesia ke pasar Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat.
- Pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce untuk memperluas akses pasar.
- Pengembangan kawasan sentra tanaman herbal berbasis kemitraan petani dan industri.

Sebagai tindak lanjut, ungkap Devi, Kadin Indonesia Bidang Pertanian bersama Komtap Tanaman Herbal akan mendorong sejumlah program prioritas, yaitu:

- Pemetaan komoditas herbal unggulan nasional.
- Pengembangan klaster budidaya tanaman herbal berbasis daerah.
- Pelatihan Good Agricultural Practices (GAP) bagi petani.
- Penguatan kemitraan petani dengan industri pengolahan herbal.
- Pengembangan pusat hilirisasi dan inovasi produk herbal.
- Peningkatan akses pembiayaan dan investasi sektor herbal.
- Penguatan promosi dan ekspor produk herbal Indonesia.

Sementara itu, Kusuma Ida Anjani menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha, petani, akademisi, dan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi produk herbal nasional. "Industri herbal modern membutuhkan pasokan bahan baku yang berkualitas, berkelanjutan, dan memenuhi standar internasional. Karena itu kemitraan dengan petani serta penguatan sistem budidaya menjadi faktor kunci dalam pengembangan industri herbal Indonesia," pungkas Kusuma.

Kadin Berikan Penghargaan bagi Perusahaan dengan Praktik ESG Terbaik

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani memberikan sambutan dalam ESG Governance Kadin-GAPPS *International Awards* di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (25/06/2026).

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) dan Institute for Sustainability and Agility menggelar ESG Governance Kadin-GAPPS *International Awards* di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (25/06/2026).

Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmen nyata serta praktik unggul dalam penerapan tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan bisnisnya. Selain sebagai penghargaan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran, benchmarking, dan penguatan tata kelola ESG di Indonesia.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani, mengatakan penghargaan ini tidak sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya mendorong perusahaan memahami ESG secara lebih mendalam.

"ESG adalah tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan, mengelola risiko dan peluang, menciptakan dampak bagi masyarakat, serta membangun nilai bersama yang berkelanjutan bagi bisnis," ujar Shinta.

Dijelaskan Shinta, tahun ini penghargaan menghadirkan dua kategori utama, yakni Governance of ESG dan Project Management of ESG Initiatives. Kedua aspek tersebut saling berkaitan karena tata kelola ESG yang kuat akan memastikan keberlanjutan terintegrasi dalam strategi perusahaan, kepemimpinan, manajemen risiko, serta akuntabilitas. Sementara itu, manajemen proyek yang baik memastikan berbagai inisiatif ESG dapat diimplementasikan secara efektif dan menghasilkan dampak yang terukur.

Shinta menambahkan penghargaan diberikan dalam tiga tingkat pencapaian, yakni Best ESG Governance Excellence, Achievement, dan Commitment. Struktur tersebut mencerminkan keyakinan keberlanjutan merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang.

Kami berharap semakin banyak perusahaan berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang. Semakin banyak perusahaan yang terlibat, semakin kuat pula ekosistem ESG Indonesia. Kami ingin lebih banyak perusahaan Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global," tuturnya



Jajaran Pengurus Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia berfoto bersama para perwakilan perusahaan penerima penghargaan ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (25/06/2026).

"Sementara itu, WKU Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia Elim Sritaba mengatakan penerapan ESG harus menjadi salah satu fondasi utama bagi dunia usaha, khususnya bagi anggota Kadin. Hal tersebut sejalan dengan peran Kadin dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita berdiskusi mengenai apa yang bisa mendorong hal tersebut, karena kita tahu para pelaku usaha memiliki target yang besar dan juga harus mampu menembus pasar internasional," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap Tata Kelola ESG Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards Maria R. Nindita Radyati menjelaskan inovasi teknologi menjadi salah satu temuan menarik dalam kategori ESG Governance.

Ia mengatakan sejumlah perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun dashboard ESG yang memungkinkan pemantauan kinerja keberlanjutan secara real time.

"Di dalam governance, banyak perusahaan berinovasi dengan menggunakan teknologi untuk dashboard ESG sehingga mereka dapat memonitor kinerja sustainability setiap saat. Dengan sistem tersebut, perusahaan bisa langsung melihat bagaimana kinerja ESG mereka, termasuk berbagai masukan atau keluhan dari masyarakat, konsumen, maupun karyawan," kata Maria.

Lebih jauh, Finance Director of GAPPS Tony M. Simmonds mengungkapkan kesan positifnya terhadap perkembangan praktik ESG di Indonesia. Berdasarkan proses penjurian, ia menilai perusahaan-perusahaan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ESG dan keberlanjutan.

"Apa yang kami temukan selama proses penjurian adalah perusahaan-perusahaan Indonesia sangat fokus pada ESG dan keberlanjutan. Saya bahkan berpikir Australia dapat belajar banyak dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan cara mereka menjalankan berbagai inisiatif tersebut," pungkasnya.



Governance Awards

Para penerima penghargaan dalam sesi Governance Awards:

1

Kategori ESG Governance Commitment, sektor Transportation & Logistic, penghargaan diberikan kepada PT Pelabuhan Indonesia Persero

2

Kategori ESG Governance Achievement, sektor Energy, penghargaan diberikan kepada PT PLN Indonesia Power

3

Kategori ESG Governance Achievement, sektor Industrials, penghargaan diberikan kepada PT United Tractors Tbk

4

Kategori ESG Governance Excellence, sektor Basic Materials, penghargaan diberikan kepada PT Purinusa Ekapersada dari APP

5

Kategori ESG Governance Excellence, sektor Consumer Cyclical, penghargaan diberikan kepada PT Daya Intiguna Yasa Tbk

6

Kategori Best ESG Governance, sektor Energy, penghargaan diberikan kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)

7

Kategori Best ESG Governance, sektor Energy, penghargaan diberikan kepada PT Pertamina Persero



Project Manangement Awards

Para penerima penghargaan dalam sesi Project Manangement Awards:

1

Kategori ESG Project Management Commitment, sektor Industrials, penghargaan diberikan kepada PT United Tractors Tbk

2

Kategori ESG Project Management Achievement, sektor Energy, untuk project Andaru Water Legacy. penghargaan diberikan kepada PT Borneo Indobara

3

Kategori ESG Project Management Achievement, sektor Basic Materials, dengan 3 (tiga) project sekaligus PT OKI Integrates Renewable Energy Into Core Mill Operations, TEMA Bambu, dan DMPA Desa Makmur Peduli Alam, penghargaan diberikan kepada PT Purinusa Ekapersada (APP).

4

Kategori ESG Project Management Achievement, sektor Energy, untuk project Desa Energi Berdikari / Energy-Independent Village (DEB), diberikan kepada PT Pertamina Persero

5

Kategori ESG Project Management Excellence, sektor Basic Materials, untuk project Waterwise (Water Management), penghargaan diberikan kepada PT Vale Indonesia Tbk

6

Kategori ESG Project Management Excellence, sektor Basic Materials, untuk project TIGER (GHG), penghargaan diberikan kepada PT Vale Indonesia Tbk

7

Kategori ESG Project Management Excellence, sektor Consumer Cyclical, untuk project MR.DIY Untuk Indonesia, penghargaan diberikan kepada PT Daya Intiguna Yasa Tbk

8

Kategori Best ESG Project Management, sektor Energy, untuk project WASTECO (Waste to Energy), penghargaan diberikan kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)



Indonesia-Belarus Business Forum Hasilkan 11 Kerja Sama Strategis, Kadin Dorong Investasi Jangka Panjang

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady memberikan *opening remarks* dalam acara *Indonesia-Belarus Business Forum and Business Matching* di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Belarusian Chamber of Commerce and Industry menggelar *Indonesia-Belarus Business Forum and Business Matching* di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Forum bisnis ini digelar dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Grigoryevich Lukashenko ke Indonesia pada 1 Juli 2026.

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, mengatakan dunia saat ini menghadapi tantangan berupa perubahan rantai pasok global, meningkatnya ketidakpastian pasar hingga dinamika geopolitik yang semakin memengaruhi tatanan ekonomi dunia.

Menurut James, kondisi tersebut membuat setiap negara perlu membangun kemitraan ekonomi baru yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar meningkatkan nilai perdagangan.

"Forum hari ini bukan hanya tentang meningkatkan perdagangan, tetapi membangun kemitraan jangka panjang antara Indonesia dan Belarus," ujar James.

James mengatakan Belarus memiliki keunggulan di bidang rekayasa teknik, manufaktur industri, teknologi pertanian, pupuk, alat berat, sains, dan pendidikan teknik. Sementara itu, Indonesia memiliki kekuatan berupa populasi sekitar 285 juta jiwa, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi serta sektor swasta yang dinamis.

"Keunggulan kedua negara saling melengkapi. Belarus membawa teknologi, kemampuan rekayasa, pengalaman manufaktur, sementara Indonesia menawarkan skala pasar, talenta, kewirausahaan, sumber daya, dan salah satu pasar domestik terbesar di dunia," kata James.

James mendorong perusahaan-perusahaan Belarus tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar ekspor, tetapi juga sebagai basis investasi jangka panjang dengan membangun pabrik, melakukan alih teknologi, mengembangkan manufaktur serta bermitra dengan perusahaan Indonesia.

Menurut James, langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat basis manufaktur nasional, meningkatkan kapasitas industri, memperkuat ketahanan pangan, produktivitas pertanian, serta penguasaan teknologi. Ia juga menilai Indonesia kini semakin berkomitmen menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi investor asing.

James mencontohkan keberhasilan perusahaan-perusahaan Jepang yang tidak hanya menjual produk ke Indonesia, tetapi juga melakukan investasi, melokalisasi produksi, mengembangkan sumber daya manusia lokal, dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha nasional.

"Barangkali Belarus dapat menulis kisah suksesnya sendiri di Indonesia," ujar James.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady (kanan) menyambut kehadiran Wakil Perdana Menteri Republik Belarus H.E. Viktor Karankevich di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, James mengatakan pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dunia menuju kawasan Pasifik menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang menuju pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa. Sebaliknya, ia juga berharap semakin banyak perusahaan Indonesia yang menjalin usaha patungan dan investasi bersama di Belarus untuk mengakses kawasan Eurasia yang lebih luas.

"Pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja sama dan memperkuat hubungan diplomatik, tetapi dunia usahalah yang menciptakan investasi, lapangan kerja, transfer teknologi, dan kemakmuran," kata James. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkapkan, nilai perdagangan Indonesia dan Belarus yang saat ini mencapai sekitar 220 juta dolar AS terus menunjukkan peningkatan, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dengan Eurasian Economic Union (I-EAEU).

Ia berharap proses ratifikasi perjanjian tersebut segera rampung sehingga lebih dari 90 persen produk Indonesia dapat memasuki pasar negara-negara anggota EAEU, termasuk Belarus, dengan tarif bea masuk nol persen.

Presiden telah mempersiapkan surat kepada DPR untuk proses ratifikasi. Rusia dan Belarus juga telah meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga kami berharap implementasinya dapat segera berjalan," kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Republik Belarus H.E. Viktor Karankevich mengatakan hubungan bilateral Belarus dan Indonesia berkembang secara dinamis berkat hubungan baik para pemimpin kedua negara. Ia menyebut kerja sama kedua negara terus meningkat di berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan hingga industri.

"Hari ini kami telah menandatangani sejumlah dokumen yang akan memberikan dorongan baru bagi penguatan hubungan ekonomi bilateral antara Belarus dan Indonesia," pungkasnya.

Dalam forum tersebut, kedua belah pihak juga menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama strategis antar-lembaga, dunia usaha dan perguruan tinggi kedua negara, di antaranya:

1. Cooperation Agreement between the Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry.
2. Cooperation Agreements between the Minsk Branch of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the Jakarta Chamber of Commerce and Industry.
3. Cooperation Agreements between the Gomel Branch of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the East Java Chamber of Commerce and Industry.
4. Cooperation Agreements between the Mogilev Branch of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the North Sumatra Chamber of Commerce and Industry.
5. Cooperation Agreements between the Grodno Branch of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the Bali Chamber of Commerce and Industry.
6. Memorandum of Understanding between JSC Belarusian Universal Commodity Exchange and the PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.
7. Strategic Cooperation Agreement between OJSC BELAZ with PT. Belazia Trucks Indonesia for the supply of spare parts in the amount of 3,000,000 (three million) US dollars.
8. Memorandum of Understanding between Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics and Andalas University.
9. Agreement between Belarusian State University of Foreign Languages and the Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS).
10. Contract between JSC INTEGRAL and the PT. Radar Telekomunikasi Indonesia.
11. Contract between JSC INTEGRAL and the JAKARTA AEROSPACE.



Foto bersama usai perhelatan *Indonesia-Belarus Business Forum and Business Matching* di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Turut hadir dalam acara tersebut WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Peternakan Kadin Indonesia Cecep Muhammad Wahyudin, WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury,

WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina dan Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarus Kadin Indonesia Didit Ratam. Hadir pula Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi Sumatra Utara Faisal Ferial Mutyara dan Ketum Kadin Provinsi Bali I Made Ariandi.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady (kiri) bersama Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam sesi pembukaan *Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast*, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menggelar *Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast* dengan menghadirkan narasumber utama Menteri Luar Negeri RI Sugiono, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa diplomasi ekonomi merupakan salah satu instrumen utama dalam memperkuat perdagangan dan investasi Indonesia di tingkat global. Menurut Anindya atau Anin sapaan akrabnya, keterlibatan dunia usaha dalam agenda diplomasi ekonomi pemerintah semakin terbuka di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

"Ini adalah bentuk terbaik dari diplomasi ekonomi. Tidak banyak kesempatan ketika pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan bersama dalam mendorong kepentingan ekonomi nasional. Kadin sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah yang melibatkan sektor swasta dalam berbagai agenda diplomasi ekonomi internasional," ujar Anin.

Anin mencontohkan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang turut melibatkan Kadin Indonesia dalam agenda business-to-business (B2B). Dalam kunjungan tersebut, Kadin bersama mitra di Prancis membentuk *France-Indonesia High Level Business Council* sebagai wadah kolaborasi jangka panjang antara pelaku usaha kedua negara.

Menurut Anin, forum tersebut berhasil mempertemukan perusahaan-perusahaan besar dari Indonesia dan Prancis dengan nilai total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun dolar AS. Dari pertemuan itu, tercapai kesepakatan bisnis baru senilai 3,5 miliar dolar AS, melengkapi komitmen investasi sebesar 11 miliar dolar AS yang telah dicapai sebelumnya saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun 2025 lalu.

"Kami ingin bekerja sama dengan semua pihak di bidang ekonomi berdasarkan prinsip saling menghargai dan saling menghormati untuk mencapai manfaat bersama yang dapat digunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," kata Sugiono.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan *Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast* yang dinilai menjadi forum strategis dalam mendukung percepatan berbagai program ekonomi pemerintah.

Sugiono juga menilai tingginya minat perusahaan-perusahaan dari berbagai negara untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan kepercayaan internasional terhadap prospek ekonomi nasional.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady saat memberikan sambutan pada *Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast*, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

“Dan ini menunjukkan satu keyakinan bahwa Indonesia merupakan negara yang potensial untuk bekerja sama. Kita punya potensi real growth yang riil, yang berada dalam kondisi yang stabil. Kita harap ini jugalah yang terus kita jaga dan kita pelihara karena stabilitas, keamanan, dan perdamaian ini mahal harganya,” ujar Sugiono.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, menilai Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah memainkan peran penting dalam memperkuat kemitraan internasional Indonesia serta menerjemahkan visi Presiden Prabowo ke dalam berbagai kerja sama strategis yang mendukung kepentingan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, James juga menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat akibat ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global, tekanan inflasi, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Menurutnya, sejumlah negara saat ini menghadapi tekanan keuangan yang serius, termasuk penurunan cadangan devisa dan kebutuhan pembiayaan eksternal yang semakin besar. Di sisi lain, pasar global juga menghadapi fenomena konsentrasi investasi pada sejumlah kecil perusahaan teknologi yang didorong perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan industri semikonduktor.

“Dunia sedang menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Karena itu, ketahanan ekonomi domestik menjadi semakin penting. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, populasi muda, dan kelas menengah yang terus tumbuh,” kata James.

Ia menambahkan bahwa sektor perumahan, pariwisata, ketahanan pangan, hilirisasi industri, manufaktur, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan sektor-sektor strategis yang perlu terus diperkuat untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Meski demikian, James tetap optimistis terhadap prospek Indonesia. Menurutnya, minat investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi, baik dari China, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Timur Tengah, maupun berbagai kawasan lainnya.

“Indonesia tetap menjadi salah satu kisah pertumbuhan ekonomi besar yang paling menarik di dunia. Karena itu, forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat dialog, kemitraan, dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan global,” pungkask James.

Hadir dalam acara tersebut WKUK Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe.

Hadir pula Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Utara Faisal Ferial Mutyara, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Selatan Affandi Udji, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi dan Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Barat Zaneth Raodathul.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan sambutannya pada *Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast*, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Anindya Bakrie Ungkap Hong Kong Berperan Strategis Perkuat Perdagangan dan Investasi Indonesia



Anindya Novyan Bakrie (Kiri) foto bersama Prof. Tang Heiwai, Associate Dean HKU Business School (tengah) dan Prof. Li Cheng, *Founding Director CCCW* sekaligus *Professor School of Governance and Policy*, HKU (kanan) usai menghadiri acara *Hong Kong University – Centre on Contemporary China and the World Dinner* bertajuk “Advancing China-ASEAN Regional Cooperation: Hong Kong’s Strategic Role amid Shifting Geopolitical Dynamics” di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam (11/6/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Hong Kong memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, sekaligus mendorong peningkatan perdagangan dan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya usai menghadiri acara *Hong Kong University – Centre on Contemporary China and the World Dinner* bertajuk “Advancing China-ASEAN Regional Cooperation: Hong Kong’s Strategic Role amid Shifting Geopolitical Dynamics” di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam (11/6/2026).

Anin mengatakan forum tersebut membahas upaya memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Hong Kong yang juga diharapkan dapat mendukung hubungan ekonomi yang lebih erat antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

“Bagaimana Indonesia dan Hong Kong/Tiongkok bisa bekerja sama lebih baik lagi, dan itu ditingkatkan juga bukan hanya Indonesia tapi ASEAN. Tapi kita fokus untuk Indonesia,” ujar Anin.

Menurut Anin, dinamika geopolitik global saat ini membuat hubungan yang harmonis antara negara-negara Barat dan Timur menjadi semakin penting.

“Di sini disampaikan bahwa dunia ini sedang sangat dinamis. Sehingga bisa dibayangkan bahwa hubungan yang baik antara Barat dan Timur sangat penting,” kata Anin.

Anin menilai Hong Kong memiliki posisi strategis sebagai gerbang menuju Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.

“Yang bisa dibilang Hong Kong itu adalah gateway daripada Tiongkok Kita ketahui bahwa Tiongkok adalah trading partner nomor satu di Indonesia dan nomor dua adalah Amerika (Serikat),” ujar Anin.

Selain itu, Anin juga menyoroti kontribusi Hong Kong terhadap investasi di Indonesia. “Nah, yang kedua kita lihat juga bahwa Hong Kong ini telah berhasil membawa investasi sekitar 10,8 miliar dolar AS,” katanya.

Anin juga menegaskan bahwa peningkatan perdagangan dan investasi menjadi kunci penting untuk memperkuat perekonomian nasional, terutama di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Jadi Indonesia dengan keadaan seperti ini, di mana ada tekanan di rupiah, itu caranya ya cuma dua, meningkatkan perdagangan dan membawa tentunya foreign direct investment (FDI). Nah ini yang tentunya dari Kadin mendorong penuh,” pungkas Anin.

KADIN DAERAH

Gelar Prasasta Gala Awards 2026, Kadin Jateng Pacu Daya Saing Daerah



Penandatanganan pernyataan bersama (*joint statement*) antara Kadin Provinsi Jawa Tengah, Universitas Semarang (USM), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, serta penyelenggara Prasasta Gala Awards (PGA) dilakukan di Kantor Kadin Jateng, Jalan Papandayan, Semarang, Jateng Selasa (09/06/2026).

Semarang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem kemitraan strategis guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Langkah yang diwujudkan melalui kolaborasi bersama Universitas Semarang (USM) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng dengan penyelenggaraan ajang penghargaan bergengsi USM Prasasta Gala Awards (PGA) 2026.

Sinergi strategis yang ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama (*joint statement*) di Kantor Kadin Jateng, Jalan Papandayan, Semarang, Jateng Selasa (09/06/2026).

Ketua Umum Kadin Provinsi Jateng Harry Nuryanto Soediro, menegaskan bahwa keterlibatan aktif Kadin didasarkan pada kepentingan strategis dunia usaha.

“Bagi dunia usaha, sebuah penghargaan akan menjadi pemacu dan pemicu dalam memberikan dampak strategis usaha karena membangun tingkat kepercayaan serta reputasi di mata konsumen, investor, maupun stakeholder,” jelas Harry.

Menurutnya, sebuah penghargaan yang kredibel bukan sekadar seremonial, melainkan instrumen penting untuk memotivasi pelaku usaha serta memacu produktivitas dari tingkat daerah.

“Semoga kesempatan ini menjadi wujud kerja kolaboratif untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing, menuju kemajuan kualitas masyarakat Jawa Tengah yang tangguh,” terang Harry.

Sementara itu, Rektor USM Supari menguraikan bahwa perguruan tinggi harus mampu berdenyut seirama dengan dinamika dunia usaha.

“Sinergi yang mempertemukan pilar akademisi, dunia usaha, dan media yang menempatkan Kadin sebagai penilai kontekstual di sektor ekonomi, sedangkan PWI bertindak sebagai jangkar objektivitas publik,” kata Supari.

Lebih lanjut, Ketua PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana turut menyoroti pentingnya titik temu ini.

“Ketika kampus sebagai dapur gagasan, dunia usaha sebagai mesin penggerak ekonomi, dan media sebagai mata publik bersinergi, maka akan lahir inovasi dan keberpihakan pada kepentingan bangsa,” pungkasnya.

Kadin NTT Dukung *Friendship City* Kupang-Darwin, Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata



Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto (tiga dari kiri) bertemu Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis (tengah) dalam mewujudkan kerja sama *Friendship City* dengan Darwin, Australia yang berlangsung di Kantor Wakil Wali Kota Kupang, Kupang, NTT pada Rabu (10/06/2026).

Kupang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh Pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan kerja sama *Friendship City* dengan Darwin, Australia.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan ekonomi, pendidikan, pariwisata, olahraga, hingga investasi antara kedua wilayah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Kadin Provinsi NTT dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, yang berlangsung di Kantor Wakil Wali Kota Kupang, Kupang, NTT pada Rabu (10/06/2026).

Ketua Umum Kadin Provinsi NTT Bobby Lianto menegaskan pihaknya siap mendampingi Pemerintah Kota Kupang selama proses kerja sama berlangsung.

Ia mengatakan Kadin Provinsi NTT telah lama menginisiasi hubungan antara Kupang dan Darwin melalui komunikasi intensif dengan Konsulat Republik Indonesia di Darwin serta Chamber of Commerce and Industry (CCI) Northern Territory.

Selain mendukung pemerintah daerah, Bobby juga mengungkapkan rencana Kadin Provinsi NTT membawa sejumlah pelaku usaha asal NTT dalam kunjungan ke Darwin guna membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas.

Menurutnya, komunikasi dengan berbagai pihak di Darwin telah berjalan dengan baik dan beberapa bentuk kerja sama telah terealisasi, termasuk kolaborasi bersama Alana Group yang telah melaksanakan sejumlah kegiatan di Kota Kupang.

Kadin (Provinsi) NTT menilai kerja sama *Friendship City* memiliki prospek besar untuk dikembangkan di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, perdagangan, pariwisata, olahraga, hingga pengembangan sumber daya manusia,” kata Bobby.

Di bidang pendidikan, lanjut Bobby, peluang yang dapat dikembangkan antara lain program pertukaran pelajar, kerja sama antarlembaga pendidikan, hingga peningkatan kapasitas generasi muda melalui kolaborasi internasional.

“Bahkan, beberapa sekolah di Kota Kupang dan Australia telah memulai kegiatan pembelajaran bersama secara daring melalui *platform Zoom* sebagai langkah awal mempererat hubungan antar-generasi muda kedua kota,” terang Bobby.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kunjungan delegasi Pemerintah Kota Kupang ke Darwin pada Juli mendatang sebagai tindak lanjut atas undangan Pemerintah Kota Darwin untuk melakukan penandatanganan kerja sama antar-kota.

"Bahkan, beberapa sekolah di Kota Kupang dan Australia telah memulai kegiatan pembelajaran bersama secara daring melalui *platform Zoom* sebagai langkah awal mempererat hubungan antar-generasi muda kedua kota," terang Bobby.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kunjungan delegasi Pemerintah Kota Kupang ke Darwin pada Juli mendatang sebagai tindak lanjut atas undangan Pemerintah Kota Darwin untuk melakukan penandatanganan kerja sama antar-kota.

Serena Francis menjelaskan bahwa proses menuju penandatanganan nota kesepahaman (MoU) harus melalui berbagai tahapan administrasi, termasuk penyampaian *Letter of Intent (LoI)* atau surat pernyataan minat sebagai langkah awal kerja sama.

"Seluruh dokumen kerja sama dengan pemerintah luar negeri wajib mengikuti ketentuan dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Melalui kerja sama *Friendship City* antara Kupang, Darwin dan Pemerintah Kota Kupang bersama Kadin Provinsi NTT berharap hubungan bilateral di tingkat daerah semakin kuat dan mampu menghadirkan berbagai peluang baru yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Ekonomi Kadin Provinsi NTT Christopher Samara, WKU Bidang Asosiasi Kadin Provinsi NTT Randy Fransisco serta Direktur Eksekutif Kadin Provinsi NTT Mercy Siubelan.



Pertemuan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kota Kupang membahas kerja sama *Friendship City* dengan Darwin, Australia yang dilaksanakan di Kantor Wakil Wali Kota Kupang, Kupang, NTT pada Rabu (10/06/2026).

Kadin Papua Tengah Bentuk Koperasi Honai, Siap Jadi Penggerak UMKM di 8 Kabupaten



Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Tengah Alexander Gobay (dua dari kanan) dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun (dua dari kiri) saat peluncuran Koperasi Induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang yang berlangsung di Auditorium LPP RRI, Nabire, Papua Tengah pada Selasa (09/06/2026).

Nabire – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Tengah membentuk koperasi Honai Papua Tengah Terang yang disiapkan menjadi penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat ekonomi kerakyatan di delapan kabupaten di provinsi tersebut.

Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Tengah Alexander Gobay mengatakan koperasi tersebut dibentuk untuk memberikan wadah dan perlindungan bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian masyarakat.

"Kami membentuk koperasi ini karena UMKM merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Kadin hadir sebagai payung untuk melindungi dan membina koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan," kata di acara Seminar Kadin Potensi Ekonomi Papua Tengah dirangkai dengan "Peluncuran Koperasi Induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang" yang berlangsung di Auditorium LPP RRI, Nabire, Papua Tengah pada Selasa (09/06/2026).

Menurut dia, koperasi akan menghimpun dan memperkuat pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk pangan dan perikanan.

Ia menjelaskan, Koperasi Honai Papua Tengah Terang akan dikembangkan di seluruh kabupaten di Papua Tengah agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan memperkuat jaringan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya koperasi tersebut, lanjutnya, pelaku UMKM diharapkan memiliki akses yang lebih baik terhadap pengembangan usaha, peningkatan kapasitas, serta peluang kerja sama yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

Ia mengatakan, koperasi tersebut merupakan binaan Kadin Provinsi Papua Tengah yang disiapkan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Koperasi ini akan menjadi wadah bagi UMKM untuk berkembang dan menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi Papua Tengah," ujarnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun mengatakan kehadiran Koperasi Honai Papua Tengah Terang merupakan langkah konkret dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut dia, koperasi harus menjadi instrumen yang mampu memberikan manfaat langsung melalui penguatan produksi, pemasaran, pengembangan usaha, dan perluasan akses ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata dia, terus mendorong penguatan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, ekonomi kreatif, dan ekowisata berbasis komunitas.

"Kita ingin membangun ekonomi yang kuat dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga Papua Tengah tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga memiliki masyarakat yang mandiri dan produktif secara ekonomi," pungkas Victor.

Kadin Kalsel Berharap Perbaiki Iklim Usaha Usai Berakhirnya Fasilitas PPh

Final UMKM



Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2026-2031 Andi Iwan Darmawan Aras (kanan) resmi dikukuhkan dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Provinsi Sulsel yang berlangsung di Hakuna Matata Resort, Bulukumba, Sulsel pada Sabtu (13/06/2026).

Banjarmasin – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Shinta Laksmi Dewi, menilai kebijakan pemerintah yang mengakhiri fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5 persen bagi sebagian badan usaha akan memberikan tekanan tambahan terhadap dunia usaha yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Menurut Shinta, pelaku usaha saat ini sedang berjuang menghadapi kenaikan berbagai biaya operasional, mulai dari biaya tenaga kerja, kewajiban administrasi perpajakan, tingginya biaya logistik, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang turut mempengaruhi biaya produksi.

“Khususnya bagi firma, CV, dan PT, tentu kebijakan ini terasa cukup berat. Dunia usaha saat ini sedang menghadapi banyak tantangan. Ada kenaikan berbagai biaya usaha, kenaikan upah pekerja, kewajiban administrasi, serta kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Jadi ketika ada perubahan kebijakan pajak, dampaknya pasti langsung terasa,” ujar Shinta di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (02/06/2026).

Ia menjelaskan, dalam jangka pendek kenaikan beban pajak berpotensi mengurangi margin keuntungan perusahaan. Dampak lanjutannya bisa memengaruhi daya saing usaha dan pada akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat.

“Ketika biaya usaha meningkat, margin keuntungan akan menurun. Kalau margin turun, ruang usaha untuk berkembang juga berkurang. Pada akhirnya daya saing melemah dan masyarakat juga bisa terdampak karena harga barang maupun jasa berpotensi naik,” katanya.

Meski demikian, Shinta mengakui pemerintah memiliki alasan kuat untuk memperkuat penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Menurutnya, apabila penerimaan negara meningkat, maka kondisi fiskal nasional akan menjadi lebih sehat dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga.

“Dalam jangka panjang kita tetap optimistis. Kalau penerimaan negara meningkat dan fiskal terjaga, maka pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Itu tentu baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Namun, Shinta menegaskan bahwa peningkatan beban pajak harus diimbangi dengan perbaikan iklim usaha dan pengurangan biaya-biaya non-produktif yang selama ini masih menjadi keluhan pelaku usaha.

“Kalau pemerintah meminta kontribusi lebih besar melalui pajak, maka harus ada kompensasi. Misalnya kepastian hukum, perlindungan hukum, kemudahan berusaha, dan penghapusan biaya-biaya yang tidak produktif. Jangan sampai pengusaha sudah membayar pajak lebih besar, tetapi masih dibebani berbagai biaya lain yang tidak jelas manfaatnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan tingginya biaya logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama bagi dunia usaha. Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi agar biaya distribusi barang dapat ditekan sehingga tidak semakin membebani sektor usaha.

Salah satu yang disorot adalah kebijakan harga bahan bakar minyak, khususnya solar. Shinta menilai perlu ada evaluasi agar disparitas harga di lapangan tidak menimbulkan ruang penyimpangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kalau biaya logistik bisa ditekan, maka dunia usaha akan lebih kuat menghadapi kenaikan beban lainnya. Harga barang juga bisa lebih kompetitif sehingga membantu pelaku usaha dan masyarakat secara bersamaan,” katanya.

Terkait UMKM, Shinta menilai kelompok usaha ini akan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan perpajakan karena umumnya memiliki modal dan arus kas yang terbatas.

“UMKM pasti merasakan dampaknya. Mereka selama ini sudah terbiasa dengan beban pajak yang relatif ringan. Ketika tarif atau mekanismenya berubah, tentu akan berpengaruh terhadap cash flow usaha mereka,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menyiapkan berbagai program pendukung bagi UMKM agar tetap mampu bertahan dan berkembang.

“Kalau pemerintah sudah memiliki pertimbangan yang kuat untuk melakukan penyesuaian pajak, maka harus ada solusi yang diberikan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Bisa melalui subsidi energi, kemudahan pembiayaan, bantuan permodalan, maupun kebijakan lain yang membantu menekan biaya usaha,” kata Shinta.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya diukur dari meningkatnya penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan keberlangsungan dunia usaha.

“Kita semua tentu ingin negara memiliki penerimaan yang kuat. Tetapi pada saat yang sama, dunia usaha juga harus tetap tumbuh. Tetapi pada saat yang sama,

dunia usaha juga harus tetap tumbuh. Karena pada akhirnya pelaku usaha adalah pihak yang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, dan menjadi sumber penerimaan negara itu sendiri,” pungkasnya.



Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi

Andi Iwan Darmawan Kembali Pimpin Kadin Sulsel Periode 2026-2031



Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2026-2031 Andi Iwan Darmawan Aras (kanan) resmi dikukuhkan dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Provinsi Sulsel yang berlangsung di Hakuna Matata Resort, Bulukumba, Sulsel pada Sabtu (13/06/2026).

Bulukumba – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII yang berlangsung di Hakuna Matata Resort, Bulukumba, Sulsel pada Sabtu (13/06/2026).

Dalam Muprov tersebut, Andi Iwan Darmawan Aras terpilih kembali sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Sulsel periode 2026-2031 secara aklamasi.

Dalam sambutannya, Andi mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kadin Provinsi Sulsel atas kepercayaan dan amanah yang diberikan.

“Kepercayaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi merupakan amanah besar yang harus kita jalankan bersama demi kemajuan dunia usaha dan perekonomian Sulawesi Selatan,” kata Andi.

Andi menegaskan bahwa Kadin Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinannya akan menjadi organisasi yang terbuka, adaptif, dan mampu menjadi wadah kolaborasi bagi seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.

“Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh stakeholder dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Kami percaya bahwa sinergi adalah kunci utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Andi.

“Lebih lanjut kata Andi, Provinsi Sulsel memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis seperti perdagangan, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, energi, dan ekonomi kreatif yang harus dikelola secara optimal melalui kerja sama yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah.

“Melalui Kadin (Provinsi) Sulawesi Selatan, kami akan berupaya menghadirkan program-program yang konkret dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing usaha, penguatan UMKM, serta pengembangan investasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kadin harus hadir sebagai solusi dan penggerak kemajuan ekonomi daerah,” kata Andi Iwan.

Andi juga mengajak seluruh pengurus Kadin Kabupaten/Kota, asosiasi usaha, serta seluruh elemen dunia usaha untuk meninggalkan perbedaan dan bersatu membangun organisasi yang lebih kuat.

“Mari kita jadikan momentum Muprov ini sebagai titik awal memperkuat persatuan dan kolaborasi. Tidak ada lagi sekat-sekat, yang ada adalah semangat bersama untuk memajukan Sulawesi Selatan. Dengan kebersamaan dan kerja nyata, saya yakin Kadin (Provinsi) Sulsel akan semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa,” pungkas Andi.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro dan WKU Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang.

Pengurus Kadin Kepri 2026-2031 Dikukuhkan, Anindya Bakrie Minta Agar *Free Trade Zone* Dioptimalisasi Demi Menarik Minat Investor



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat memberikan sambutan dan melantik pada acara Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2026-2031 bertajuk "Peran Strategis Kadin dalam Mendorong Ekonomi Daerah dan Nasional" yang diselenggarakan di Aula Wan Seri Beni, Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (16/06/2026).

Tanjungpinang – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie resmi mengukuhkan jajaran pengurus Kadin Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masa bakti 2026-2031 di Aula Wan Seri Beni, Dompok, Tanjungpinang, Kepri pada Selasa (16/06/2026). Usai acara pengukuhan bertajuk "*Peran Strategis Kadin dalam Mendorong Ekonomi Daerah dan Nasional*", Anindya atau Anin sapaan akrabnya meminta para pengurus yang baru untuk mengembangkan Kadin Provinsi Kepri lebih baik lagi.

"Karena arahan Presiden, Kadin harus membuat yang besar menjadi besar dan yang kecil menjadi besar. Apalagi FTZ (*Free Trade Zone*) di Kepri sudah bagus dan dapat dioptimalkan lebih jauh lagi," kata Anin.

Anin menjelaskan, bahwa Kadin Provinsi Kepri harus dapat memasarkan kawasan FTZ kepada investor. Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat sistem marketing dan melakukan kampanye ekonomi.

"Saya mendukung Kadin (Provinsi) Kepri dapat menjadi FTZ yang menguntungkan secara menyeluruh," tambah Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri masa bakti 2026-2031 Mustava mengatakan saat ini Provinsi Kepri menjadi tujuan utama dalam hal investasi data center. Sehingga, Kepri memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi.

“Terlebih di (kepengurusan) Kadin (Provinsi) Kepri terdapat 33 wakil ketua bidang, sesuai kebutuhan industri yang ada. Jadi ke depannya Kadin akan terus berkembang,” ujar Mustava.

Lebih lanjut, kondisi geopolitik yang terjadi saat ini, menurut Mustava investor banyak berinvestasi ke Kepri, terutama untuk wilayah FTZ. Sebab di wilayah tersebut terdapat kemudahan dalam proses perizinan, yang dapat menarik para investor.

“Kita optimis, ke depannya ekonomi kita terus melaju. Apalagi saat ini banyak wisatawan dari negara tetangga, seperti Singapura yang datang setiap minggu ke Batam,” pungkas Mustava.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Aziz Syamsuddin, WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro, WKU Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari, WKU Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang dan WKU Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Indonesia Akhmad Ma'ruf Maulana.



Foto bersama usai acara Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2026-2031 bertajuk “Peran Strategis Kadin dalam Mendorong Ekonomi Daerah dan Nasional” yang diselenggarakan di Aula Wan Seri Beni, Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (16/06/2026).



**BELARUSIAN
CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY**

Together we achieve more



INDONESIA-BELARUS BUSINESS FORUM AND BUSINESS MATCHING

**IN CONJUNCTION WITH THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
H.E. ALEKSANDR LUKASHENKO VISIT TO THE REPUBLIC OF INDONESIA**

TUESDAY, JUNE 30 2026 | ARYADUTA HOTEL, JAKARTA

SPONSORED BY:





Kadin Indonesia ROADSHOW TO CHINA



In conjunction with the Chairship of APEC China 2026, APEC Leaders Summit, APEC China CEO Forum 2026 and Kadin Participation at the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE)

Beijing-Jinan-Tianjin
21-26 June 2026

Sponsored by:



BCA



WOMANPRENEUR DEVELOPMENT FORUM

UNLOCKING DIGITAL OPPORTUNITY

Training oleh



 SELASA, 23 JUNI 2026  PK. 09.00—14.00 WIB

Link Pendaftaran: event.kadin.id/WomenpreneurGoesToCampus





Strategic Human Capital Dialogue :

Pemetaan SDM Teknik dan Profesi untuk Reindustrialisasi Indonesia

Rabu, 24 Juni 2026 | 09.00 – 12.30 WIB
RGE Lounge, Menara Kadin Indonesia Lt. 29



Shinta Widjaja Kamdani

WKUK Bidang Pembangunan, Manusia,
Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan



Insannul Kamil

Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama
Pengembangan Profesi SDM Teknik dan Industri



Adi Mahfudz

Anggota Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP)



**Dr. Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie,
MBA., IPU., ASEAN Eng.**

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII)



Heru Dewanto

Wakil Ketua Umum Bidang
Pengembangan Profesi



**DR. Dr. Slamet Budiarto.,
S.H., MH.Kes**

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI)



Harif Fadhilah*

Ketua Umum Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI)



**Emir Zullarwan Pohan,
S.H., LL.M.**

Sekretaris Jenderal PERADI



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!

ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:



Australia



Jepang



Rusia



Brunei
Darussalam



Korea Selatan



Selandia Baru



Cile



Malaysia



Singapura



China



Meksiko



Tailan



Filipina



Papua Nugini



Taiwan



Hong Kong



Peru



Vietnam



Indonesia



Keuntungan Memiliki ABTC:



Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada



Bisa menetap 90 hari per kunjungan



Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara



Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

- 1 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
- 2 Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
- 3 Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
- 4 Scan NIB perusahaan
- 5 Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional



sekretariat@kadinindonesia.id
cc: selly.kadin@gmail.com



<https://trade.layanankadin.id/abtc>

Layanan Dokumen Ekspor

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis SKA/COO

SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:



- 1 Buka <https://trade.layanankadin.id/>
- 2 Log in atau Mendaftar Akun
- 3 Melengkapi Data-data perusahaan
- 4 Melakukan Pembayaran
- 5 Dokumen siap dicetak dan digunakan

Jenis Formulir COO

Form China	Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Preferential Tariff Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.
Form B	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.
Form B with Notification	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.
Form ASEAN-India	Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form A	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.
Form D	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form Textile Product	Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia
Form Certificate of Export Goods	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.
Form Certificate of Free Sale	Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.



GUNAKAN ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR SEMENTARA

APA ITU ATA CARNET?

ATA Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.

Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai **"Paspor untuk Barang"**. Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

PENGGUNA ATA CARNET

Pebisnis

Teknisi

**Penyelenggara
Pameran**

**Profesional,
perorangan/tim**

Kru Film

**Dokter/
Ahli Bedah**

Arsitek

Seniman

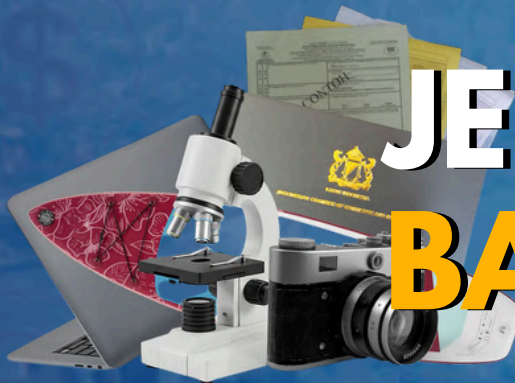
Engineer

Peneliti

Tim Olahraga

Grup Musik





JENIS-JENIS BARANG

Penerapan **ATA Carnet** dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

- 1 Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis
- 2 Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli
- 3 Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan
- 4 Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga
- 5 Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

PERSYARATAN PENERBITAN ATA CARNET

Salinan (*copy*) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili

Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili

Salinan (*copy*) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin

Salinan (*copy*) NPWP Perusahaan/Perorangan

Salinan (*copy*) SIUP, TDP, dan Domisili Perusahaan

Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang

Rencana Perjalanan Barang

Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal

Menandatangani surat pernyataan bermaterai

Meletakkan Jaminan



NEGARA-NEGARA YANG MENERBITKAN DAN MENERIMA **ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR DAN IMPOR SEMENTARA:**

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Afrika Selatan | 28. Inggris | 55. Pakistan |
| 2. Amerika Serikat | 29. Iran | 56. Pantai Gading |
| 3. Albania | 30. Irlandia | 57. Prancis |
| 4. Algeria | 31. Islandia | 58. Peru |
| 5. Andora | 32. Israel | 59. Polandia |
| 6. Arab Saudi | 33. Italia | 60. Portugal |
| 7. Australia | 34. Jepang | 61. Qatar |
| 8. Austria | 35. Jerman | 62. Republik Ceko |
| 9. Bahrain | 36. Kanada | 63. Rumania |
| 10. Belanda | 37. Kazakstan | 64. Rusia |
| 11. Belarus | 38. Korea Selatan | 65. Selandia Baru |
| 12. Belgia | 39. Latvia | 66. Senegal |
| 13. Bosnia Herzegovina | 40. Libanon | 67. Serbia |
| 14. Bulgaria | 41. Lithuania | 68. Singapura |
| 15. Chili | 42. Luksemburg | 69. Slowakia |
| 16. China | 43. Makau | 70. Slowenia |
| 17. Kroasia | 44. Madagaskar | 71. Spanyol |
| 18. Siprus | 45. Malaysia | 72. Sri Lanka |
| 19. Denmark | 46. Malta | 73. Swedia |
| 20. Estonia | 47. Maroko | 74. Swis |
| 21. Finlandia | 48. Mauritius | 75. Tailan |
| 22. Filipina | 49. Makedonia Utara | 76. Tunisia |
| 23. Gibraltar | 50. Meksiko | 77. Turki |
| 24. Hong Kong | 51. Moldova | 78. Ukraina |
| 25. Hungaria | 52. Mongolia | 79. Uni Emirat Arab |
| 26. India | 53. Montenegro | 80. Vietnam |
| 27. Indonesia | 54. Norwegia | 81. Yunani |

Dokumen **Ata Carnet** dikeluarkan oleh: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kontak:

Menara Kadin Indonesia Lantai 24, 29
Jl. HR Rasuna Said X-5 Kav.2-3
Kuningan, Jakarta



Telp. (021) 5274484



atacarnet.idn@kadin.id

atau

atacarnetindonesia@gmail.com

Cantumkan subject email:

- **Pengajuan ATA Carnet** (jika akan mengajukan ATA Carnet)
- **Info ATA Carnet** (jika ingin mendapatkan informasi mengenai ATA Carnet)





Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

Akses Situs Resmi

<https://kadin.id/keanggotaan>



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1

Daftar Akun

Buka anggota.kadinindonesia.id

5

Pembayaran

Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

2

Verifikasi Akun

Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

6

Validasi Pembayaran

Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

3

Isi Data Perusahaan/Asosiasi

Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

7

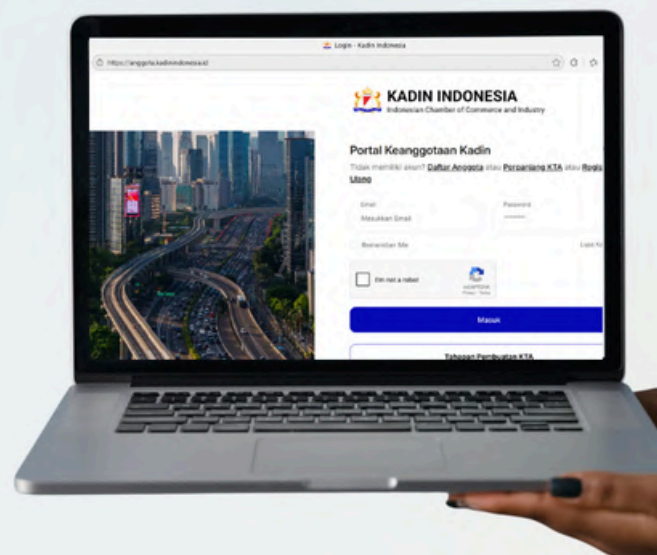
Menjadi Anggota Resmi

Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda

4

Verifikasi oleh Admin

Admin Kadin akan memverifikasi data anda



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?



KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda

Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**

Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin **memenuhi kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**

KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**

KTA dan SBU dari Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta



Manfaat Keanggotaan Kadin

Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi

Akses terhadap pasar

Dukungan advokasi

Akses terhadap transformasi digital

Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja

Dukungan dalam penerapan TKDN

Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis

Pendampingan menuju Net Zero

Kesempatan promosi

Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis

Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial

Potongan harga produk/jasa



Saatnya **Level Up** dan **Maksimalkan Potensi Bisnismu**



Daftar segera menjadi anggota Kadin



anggota@kadinindonesia.id



(+62) 85695410875



kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin

Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen

Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Hariwicahyo Utomo, Fery Hasibuan, Luthfiah Ramadhani S

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinIndonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id